



LKjIP

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

N
O
N
A

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan Negara, Nusa dan Bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang telah diubah dengan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Sijunjung, sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sesuai dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari di Kabupaten Sijunjung juga berkewajiban menyampaikan LKjIP Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta kekuatan kepada kita semua dalam pelaksanaan tugas di masa mendatang.

Muaro Sijunjung, Januari 2025

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari



IONUANGGUS, S.Hut.T

Pembina TK I (IV/b)

NIP. 19780507 199803 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Grafik.....	vi
Ikhtisar Eksekutif.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Gambaran Organisasi	1
1.2 Aspek Strategi Organisasi	8
1.3 Permasalahan Utama (Issued Strategic)	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1. Rencana Strategis OPD.....	12
2.2 Tujuan dan Sasaran	15
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
2.4 Indikator Kinerja Utama	19
2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	21
2.6 Perjanjian Kinerja	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	24
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	26
3.3 Analisa Capaian Kinerja DPMN	28
3.4 Realisasi Anggaran.....	59
BAB IV. PENUTUP	70
4.1. Kesimpulan	70
4.2. Saran-saran.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Gambaran Umum Kepegawaian DPMN	8
Tabel 1.2	Gambaran Visi dan Misi RPJMD	9
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran DPMN	16
Tabel 2.2	Program Pendukung Tujuan Sasaran	17
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan DPMN	18
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama DPMN Tahun 2024	20
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Tahun 2024	21
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	23
Tabel 2.7	Program dan Pagu DPMN Tahun 2024	23
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
Tabel 3.2	Capaian Kinerja DPMN Tahun 2024	27
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Nilai Evaluasi akuntabilitas Kinerja	28
Tabel 3.4	Perbandingan Target dengan Realisasi pada Tahun 2024	29
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya	30
Tabel 3.6	Capaian Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah	31
Tabel 3.7	Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	32
Tabel 3.8	Indikat Persentase Desa Mandiri	34
Tabel 3.9	Perbandingan Target dengan Realisasi pada Tahun 2024	35
Tabel 3.10	Klasifikasi Nagari/Desa Tahun 2024	37
Tabel 3.11	Status Jumlah Nagari per Kecamatan Tahun 2024	37
Tabel 3.12	Rekapitulasi Status Nagari Mandiri	38
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu	40
Tabel 3.14	Pengukuran IDM Provinsi Sumbar Tahun 2024	41

Tabel 3.15 Peringkat Provinsi Sumatera Barat IDM Status Mandiri Tahun 2024	41
Tabel 3.16 Rekapitulasi Status IDM Tahun 2020-2024	42
Tabel 3.17 Capaian Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah	43
Tabel 3.18 Program dan Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Persentase Desa Mandiri	49
Tabel 3.19 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Lembaga adat yang Aktif	51
Tabel 3.20 Perbandingan Target dengan Realisasi pada Tahun 2024	51
Tabel 3.21 Daftar Lembaga KAN yang aktif dan Sangat aktif Tahun 2024	52
Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu	55
Tabel 3.23 Capaian Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target Jangka Menengah	56
Tabel 3.24 Analisa Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Lembaga Adat	61
Tabel 3.25 Pagu dan Realisasi Anggaran/Program (Belanja) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan nagari Tahun 2024	62
Tabel 3.26 Efektivitas Anggaran terhadap capaian sasaran DPMN Kabupaten Sijunjung Tahun 2024	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi DPMN	7
Gambar 3.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur	46
Gambar 3.2	Pembinaan, Pendampingan, Bimbingan dalam Pembuatan Administrasi Kelembagaan kepada Pengurus Kerapatan Adat Nagari	59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	30
Grafik 3.2	Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Desa Mandiri Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	40
Grafik 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya	55

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, melalui LKjIP ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari menyajikan laporan tentang pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2024 sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang diberikan.

Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari merupakan suatu Rencana Jangka Menengah Tahun 2021-2026 dan ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang memuat pernyataan visi, misi yang diemban serta tujuan dan sasaran strategi yang harus dicapai setiap tahunnya.

Sesuai Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun untuk tahun 2024 terdapat 4 program, 10 Kegiatan dan 39 Sub kegiatan yang harus dicapai dilaksanakan dengan dukungan anggaran DPA-SKPD Tahun 2024 yang tersedia sebesar Rp. 7.450.903.920,-.

Sesuai dengan fungsi LKjIP, diharapkan penyajian Laporan ini dapat menjadi alat komunikasi pertanggung jawaban secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program/kegiatan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja instansi pemerintah ini serta sebagai umpan balik bagi pihak-pihak terkait guna perbaikan di masa mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN ORGANISASI

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat berbagai perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah termasuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah. Menindaklanjuti hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

1.1.2 Tugas dan fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari yang di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis Dinas.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikakan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

Untuk menunjang tugas dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kepala dinas dibantu oleh Sekretaris dan bidang-bidang dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan tugas urusan pemerintahan dan ditugaskan pembantuan dibidang pemberdayaan masyarakat dan nagari menjadi kewenangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah. untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemerintahan nagari, keuangan dan aset nagari, pembangunan nagari, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan nagari, keuangan dan aset nagari, pembangunan nagari, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan nagari, keuangan dan aset nagari, pembangunan nagari, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Melaksanakan administrasi dinas di bidang pemerintahan nagari, keuangan dan aset nagari, pembangunan nagari, dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas Memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua unsur di lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Pemerintahan Nagari

Bidang Pemerintahan Nagari mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pemerintahan nagari, yang dipimpin oleh Kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemerintahan Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan di bidang Penataan Nagari dan Jorong, Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian walinagari, pembentukan Badan Musyawarah Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, fasilitasi batas administrasi nagari, laporan walinagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerjasama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari ;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang Penataan Nagari dan Jorong, Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian walinagari, pembentukan Badan Musyawarah Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, fasilitasi batas administrasi nagari, laporan walinagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerjasama nagari,

pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari ;

- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan Nagari dan Jorong, Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian walinagari, pembentukan Badan Musyawarah Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, fasilitasi batas administrasi nagari, laporan walinagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerjasama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari ;
- d. Melaksanakan administrasi dinas di bidang Penataan Nagari dan Jorong, Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian walinagari, pembentukan Badan Musyawarah Nagari, penataan kewenangan dan susunan organisasi nagari, administrasi pemerintahan nagari, fasilitasi batas administrasi nagari, laporan walinagari, pelaksanaan kapasitas aparatur pemerintahan nagari, fasilitasi kerjasama nagari, pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan tipologi nagari ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

4. Bidang Keuangan dan Pembangunan Nagari

Bidang Keuangan dan Pembangunan Nagari mempunyai tugas Melaksanakan tugas di bidang keuangan dan pembangunan nagari yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Keuangan dan Pembangunan Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang Penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari ;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang Penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari ;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang Penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari;
- d. Melaksanakan administrasi dinas bidang Penataan keuangan dan aset nagari, fasilitasi perencanaan nagari, pembangunan nagari, pembangunan kawasan perdesaan/nagari, fasilitasi pendampingan nagari, pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, fasilitasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari dan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset nagari;

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

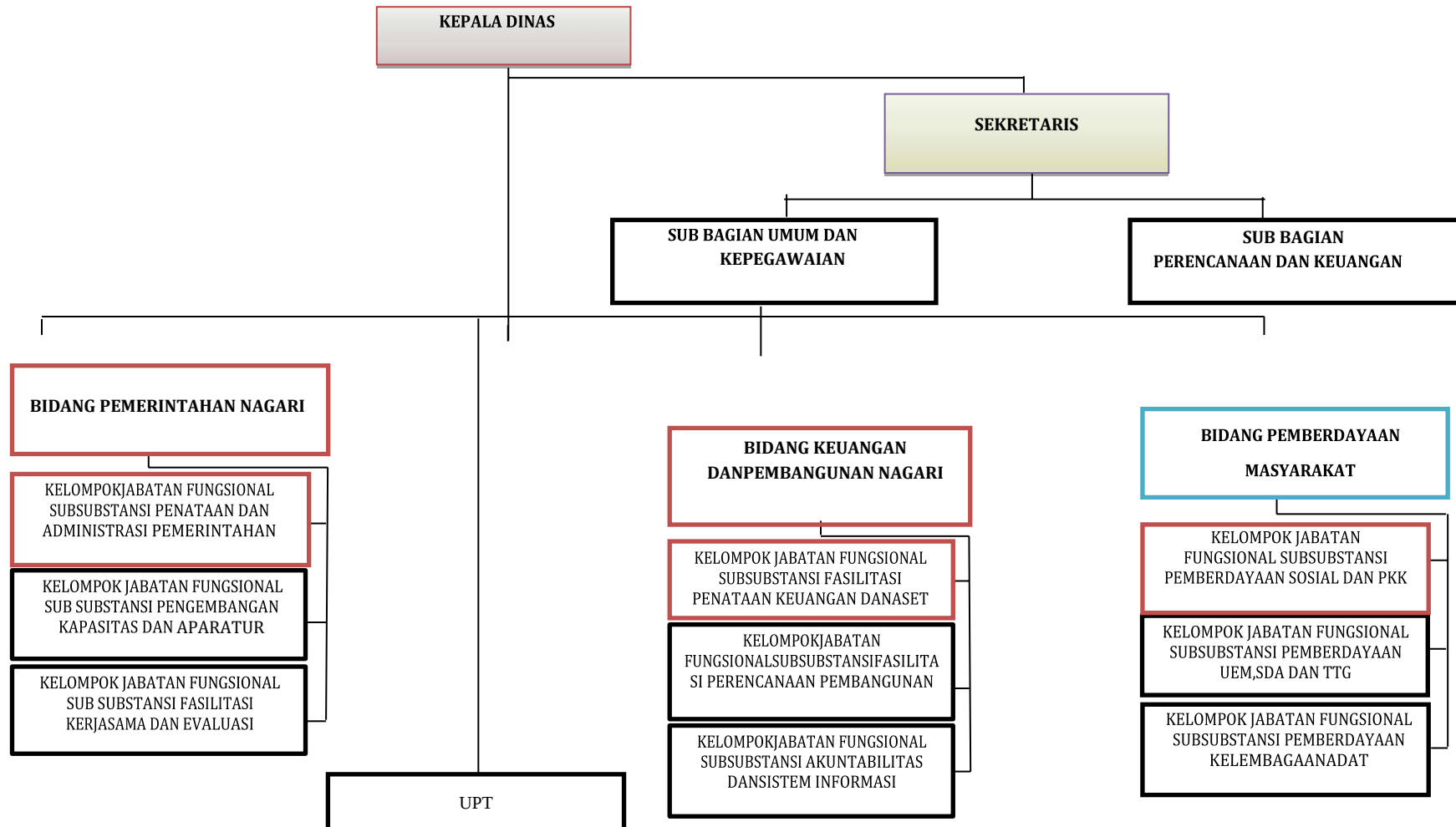
Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, PKK, Kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam, teknologi tepat guna, kelembagaan adat;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, PKK, Kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam, teknologi tepat guna, kelembagaan adat;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, PKK, Kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam, teknologi tepat guna, kelembagaan adat;
- d. Melaksanakan administrasi dinas di bidang pemberdayaan sosial, PKK, Kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam, teknologi tepat guna, kelembagaan adat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

1.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2024



1.1.4 Sumber Daya Manusia

Gambaran Umum Kepegawaian Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Nagari Bulan Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Gambaran Umum Kepegawaian
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
Per 31 Desember 2024

NO	Uraian	Jumlah (orang)
1	Jumlah ASN	
	PNS	21
	PPPK	2
	Non PNS	22
2	Jumlah Jenis Kelamin	
	a. Laki-laki	25
	b. Perempuan	20
3	Kualifikasi Pendidikan(PNS)	
	- S2	2
	- S1/D4	15
	- DI/DIII	3
	- SLTA	3
4	Kualifikasi Pendidikan(PPPK)	
	- S1/D4	2
5	Pejabat Struktural	
	- EselonII.b	1
	- EselonIII.a	1
	- EselonIII.b	3
	- Eselon IV.a	2
	- Jabatan Fungsional	4

1.2 ASPEK STRATEGI ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung sebagai pelaksana pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan nagari mendorong tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, sesuai tugas pokok dan fungsinya

mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan 3 buah Misi yakni:

1. **Misi satu** yaitu **meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi**
2. **birokrasi,**
3. **Misi kedua** yaitu **meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata,**
4. **Misi ketiga** yaitu **meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK).**

Tabel 1.2
Gambaran Visi dan Misi RPJMD Terkait DPMN

VISI RPJMD TERKAIT RPJMD	MISI RPJMD TERKAIT DPMN	TUJUAN RPJMD TERKAIT DPMN	SASARAN RPJMD TERKAIT DPMN	INDIKATOR RPJMD TERKAIT DPMN
Kabupaten Sijunjung yang sejahtera, Unggul dan Berbudaya Menuju Mayarakat Madani	Misi Satu: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birikrasi	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional	Nilai SAKIP Pemda
	Misi Kedua: Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata	Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat	Indeks Desa Membangun
	Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat	Terwujudnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat berlan-daskan ABS-SBK	Meningkatnya kualitas nilal-nilai sosial budaya masyarakat berbasis	Tingkat penurunan sengketa adat

	Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah (ABS- SBK)		kearifan lokal	
--	--	--	----------------	--

1.3 PERMASALAHAN UTAMA (*Strategic Issued*)

Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung telah melaksanakan Program dan Kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan nagari, namun dalam pelaksanaan capaian kinerja masih ada permasalahan dan rintangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan nagari baik adiministrasi pemerintahan maupun administrasi keuangan
2. Belum optimalnya peran pemerintah nagari dalam membangun wilayah secara mandiri
3. Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat Nagari/Desa (BumNag/BumDes) dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Nagari (PAN)
4. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan nagari/desa dalam pemberdayaan masyarakat nagari
5. Belum optimalnya peran Tim Penggerak PKK dalam pemberdayaan masyarakat desa/nagari
6. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga adat dinagari
7. Dinamika regulasi ditingkat pusat yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di nagari
8. Belum maksimalnya penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di nagari
9. Kurang optimalnya kerjasama antar desa/nagari dan pembentukan kawasan perdesaan dalam peningkatan ekonomi desa/nagari

10. Belum optimalnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi
11. Belum tersedianya peta batas administrasi nagari
12. Keterbatasan sumber daya manusia/tenaga ahli penggerak swadaya masyarakat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis OPD

Rencana strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut memerlukan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun dalam suatu pola yang sistematis dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung sebagai bagian dari upaya pencapaian visi RPJMD, yakni **misi pertama** terkait meningkatkan kualitas pelayanan

publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi, **misi kedua** Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata serta **misi ketiga** yakni meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung menetapkan visi sebagai berikut : **“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Sebagai Penggerak Utama Terwujudnya Masyarakat yang Berdaya, Mandiri dan Sejahtera”**

Penjelasan Visi:

Sebagai **Penggerak Utama** terkandung makna bahwa DPMN dengan keunggulan (advantage) yang dimilikinya memposisikan diri (positioning) sebagai instansi terdepan dan memiliki kemampuan untuk mensinergikan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat. Keunggulan dimaksud berkaitan dengan substansi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh DPMN memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang dilaksanakan oleh instansi lain. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh DPMN menggunakan pendekatan komprehensif/holistik (menyeluruh) dan memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan sedangkan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Lembaga lainnya menggunakan pendekatan sektoral. Keunggulan lain yang dimiliki DPMN adalah pengalaman empiris-historis pada saat melaksanakan tugas-tugas pembangunan masyarakat Nagari yang esensinya setara dengan tugas pemberdayaan masyarakat. Memposisikan DPMN sebagai penggerak utama dapat mendorong dan memotivasi seluruh aparat DPMN untuk meningkatkan kinerja

dan profesionalismenya serta tertantang untuk konsisten mengembangkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang inovatif dan dapat diterima oleh masyarakat dan stakeholder pemberdayaan masyarakat lainnya.

Kata **Mewujudkan** mengandung esensi adanya komitmen DPMN untuk melakukan upaya-upaya yang dinamis, sistematis, terencana dan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat Sijunjung.

Masyarakat yang Berdaya, memiliki esensi suatu keadaan dimasa depan yang menggambarkan masyarakat memiliki potensi dan kemampuan memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalahnya sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya dengan berbasis budaya. Kondisi ini sebagai kondisi positif yang mampu memberikan kontribusi kepada upaya mewujudkan Kabupaten Sijunjung yang sejahtera.

Mandiri, mengandung makna suatu keadaan yang menggambarkan masyarakat sijunjung dapat berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan tanpa rasa ketergantungan kepada daerah lain

Sejahtera, mengandung makna suatu keadaan yang menggambarkan masyarakat Kabupaten Sijunjung mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasar kehidupannya, terutama aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang didasari hubungan sosial yang berbudaya.

Untuk mewujudkan visi diatas diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi maka ditetapkan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung sebagai berikut:

Misi Pertama: Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat yang partisipatif.

Usaha untuk mendorong dan memperkuat kelembagaan masyarakat setempat melalui peningkatan kapasitas anggota dan kader-kader kelembagaan masyarakat agar dapat mengambil bagian dan bertanggung jawab langsung dalam kegiatan pengelolaan pembangunan

Misi Kedua :Menciptakan pemerintahan Nagari yang professional.

Upaya yang dilakukan untuk menjadikan pemerintahan Nagari yang mempunyai kualitas SDM yang lebih baik sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menuju desa yang berkembang.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

2.2.1 TUJUAN :

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang hendak dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meingkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional
2. Meningkatkan kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat
3. Meningkatnya kualitas nilai-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal

Pernyataan tujuan tersebut sekaligus memberikan arah kepada kita dalam menetapkan sasaran kegiatan organisasi.

2.2.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dalam jangka waktu satu tahun, sasaran yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas organisasi
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa
3. Meningkatnya kualitas lembaga adat

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

NO.	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional	1. Meningkatnya akuntabilitas organisasi
2.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat	2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa
3.	Meningkatkan kualitas nilai-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal	3. Meningkatnya kualitas lembaga adat

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan (Meneg PAN, 2008;21-22). Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007,

sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun. Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sebagai penjabaran dari tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program Pendukung Tujuan Sasaran

NO	SASARAN	PROGRAM
1.	Meningkatnya akuntabilitas organisasi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa	1. Program Kerjasama Desa 2. Program Penataan Desa 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat
3.	Meningkatnya kualitas lembaga adat	1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat

2.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan menentukan pilihan strategi yang perlu dilakukan oleh DPMN Kabupaten Sijunjung kemudian dapat dirumuskan kebijakan apa saja yang perlu diambil agar selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional	1. Meningkatnya akuntabilitas organisasi	1. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur yang profesional dan berintegritas 2. Meningkatkan sarana dan prasarana	1. Peningkatan kualitas nilai SAKIP 2. Peningkatan kualitas SPIP 3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
2. Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat	1. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Desa	1. Mengoptimalkan perkembangan BumNag 2. Mengoptimalkan peran lembaga perekonomian nagari dalam meningkatkan perekonomian nagari 3. Mengoptimalkan kerjasama nagari 4. Meningkatkan Administrasi Pemerintahan Desa/Nagari 5. Meningkatkan Penataan Desa/Nagari 6. Mengoptimalkan Peran lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat	1. Peningkatan kapasitas SDM pengelola BumNag 2. Peningkatan Fasilitasi, pembinaan serta monitoring perkembangan BumNag 3. Fasilitasi kerjasama antar desa/nagari 4. Fasilitasi kerjasama antar desa/nagari dengan pihak ketiga 5. Fasilitasi tata wilayah desa/nagari 6. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana nagari 7. Fasilitasi dan penataan lembaga kemasyarakatan desa

3. Meningkatnya kualitas nilai-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal	Meningkatnya kualitas lembaga adat	1. Mengoptimalkan kualitas lembaga adat dalam meningkatkan peran dan fungsinya di nagari 2. Mengoptimalkan kualitas SDM lembaga adat 3. Mengoptimalkan Peran lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat	1. Pembinaan terhadap pemangku adat 2. Peningkatan kompetensi pemangku adat 3. Penguatan peran dan fungsi lembaga adat di nagari
---	------------------------------------	---	--

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengukur pencapaian kinerja program pembangunan diatas, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung menetapkan indikator kinerja utama sebagai parameter keberhasilan, secara rinci indikator kinerja utama Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2024

Sasaran Perangkat Daerah		Indikator Kinerja sasaran	Satuan	Penjelasan		Kriteria/Definisi Operasional
				Alasan	Formula	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai	untuk mendukung target RPJMD	Nilai Evaluasi	Indek komposit yang mengukur kualitas perencanaan daerah yang berdasarkan proses, isi dan tindak lanjut perencanaan daerah
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa	Persentase Desa Mandiri	%	Pencapaian Indikator kinerja Kunci sesuai Permendagri 18 tahun 2020	Jumlah Desa mandiri Tahun N / Jumlah Desa x 100	Nagari/desa yang difasilitasi untuk menjadi nagari mandiri
3	Meningkatnya kualitas lembaga adat	Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif	%	untuk memenuhi tujuan Pembangunan Desa sesuai UU No 06 Tahun 2014 dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat	Jumlah lembaga adat yang mampu melaksanakan fungsi kelembagaannya/ jumlah lembaga adat x 100	Lembaga adat yang menjalankan fungsi kelembagaan

2.5 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan didalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja beriringan dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu, didalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Kinerja Tahunan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran dan target capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis SKPD	Indikator Kinerja	Target SKPD	Penanggung Jawab
Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	78,50	Sekretariat
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan	Persentase desa mandiri	40%	Bidang Pemerintahan Nagari Bidang Pemberdayaan

Desa			Masyarakat
Meningkatnya kualitas lembaga adat	Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif	6%	Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2.6 PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat.

Perjanjian Kinerja Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang didasarkan pada sasaran indikator kinerja IKU sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Nomor 800/033/KPTS-DPMN-2024, tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2024.

Kriteria keberhasilan penetapan kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung ditunjukkan dengan capaian keluaran indikator kinerja output yang telah ditetapkan. Sedangkan ukuran keberhasilan penetapan kinerjanya ditunjukkan dengan

capaian hasil indikator outcome yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis SKPD	Indikator Kinerja Utama SKPD	Target SKPD
Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	78,50
Meningkatnya tata kelola pemeritahan desa dan pemberdayaan desa	Persentase desa mandiri	40%
Meningkatnya kualitas lembaga adat	Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif	6%

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan RKA tahun 2024 yang terdiri dari program sebagai berikut :

Tabel 2.7
Program dan Pagu DPMN Tahun 2024

No	Nama Program	Pagu Dana (Rp)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.552.518.850,-
2	Kerjasama Desa	7.987.000,-
3	Administrasi Pemerintahan Desa	2.029.094.770,-
4	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.861.303.300,-
	Jumlah	7.450.903.920,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Adalah perwujudan Kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut.

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi.

Capaian kinerja sasaran diperoleh dengan mengukur antara realisasi dengan rencana/target, dimana kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tingginya realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

% capaian Kinerja

Realisasi Kinerja

Target kinerja

X 100%

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator Kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Range % Capaian	Kategori
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (halaman 495)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pada Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung mendapat alokasi belanja sebesar **Rp7.450.903.920,-** dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp6.983.631.958,-** (93,73%) yang didukung oleh 4 Program, 10 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan.

Seluruh anggaran tersebut diatas digunakan untuk mencapai tiga tujuan dan tiga sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026.

Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas maka dilakukan pengukuran kinerja dengan metode :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Dalam pengukuran kinerja pada LKjIP di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung dengan menggunakan cara membandingkan keberhasilan nyata dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya akuntabilitas Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	78,50	78,36	99,82%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa	Persentase Desa Mandiri	40%	66%	165%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya kualitas lembaga adat	Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif	6%	16%	267%	Sangat Tinggi

Sumber : Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian semua sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 terealisasi melebihi target yang diharapkan dengan kategori **Sangat Tinggi**.

3.3 ANALISA CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN NAGARI

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2024 disesuaikan dengan Dokumen Perjanjian Kinerja yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Siunjung, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan, Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024, serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

3.3.1 Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi

Indikator : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi dengan tolak ukur nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

NO	SASARAN	SATUAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	
			URAIAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	78,50

Pencapaian Kinerja sasaran strategis untuk indikator Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dapat disajikan sebagai berikut :

3.3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.4
Perbandingan Target dengan Realisasi pada Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN				
		URAIAN	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
1	Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	78,50	78,38	99,82	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas diketahui bahwa 1 (satu) indikator kinerja sasaran Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mencapai target sebesar 99,82% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Pada tahun 2024 sasaran meningkatnya akuntabilitas organisasi dengan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja terealisasi sebesar 78,36 point dengan kategori nilai “**BB**” (sangat tinggi) dengan capaian 99,82%. Perolehan capaian kinerja indikator ini didukung oleh dokumen dan data pendukung serta perbaikan terhadap penyusunan laporan akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang dilakukan revieu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung.

Analisis pencapaian kinerja merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran pencapaian tingkat sasaran indikator evaluasi akuntabilitas kinerja internal didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja.

3.3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024, dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024
dengan Tahun sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi		
		2022	2023	2024
Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	73,28	78,35	78,36

Grafik 3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024
dengan Tahun sebelumnya



Sumber : Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 (diolah)

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat realisasi capaian target indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, yang mana pada tahun 2022 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari terealisasi sebesar 73,28 Poin, pada tahun 2023 meningkat menjadi 78,35 poin, sementara pada tahun 2024 peningkatan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tidak begitu signifikan dengan realisasi sebesar 78,36 Poin. Hal ini disebabkan karena masih adanya komponen-komponen evaluasi akuntabilitas kinerja yang

belum terpenuhi secara maksimal seperti ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja dan publikasi dokumen perencanaan.

3.3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Terakhir Rencana Strategis

Pengukuran pencapaian tingkat sasaran indikator hasil nilai evaluasi akuntabilitas kinerja didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Tabel 3.6 menggambarkan tingkat pencapaian realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi perangkat daerah.

Tabel 3.6
Capaian Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian s.d Tahun 2023	Target capaian Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Target Jangka Menengah samapai dengan Tahun 2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	78,35	78,50	78,36	79,50

Dari target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2021-2026 poin yang akan dicapai adalah sebesar 79,50 poin. Sementara pada tahun 2024 sudah tercapai sebesar 78,36 poin.

3.3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efesien, akuntabel dan profesional, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung menyusun Perjanjian Kinerja pada setiap

level eselon sampai dengan staf guna mencapai keberhasilan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Selain itu, tingginya komitmen pimpinan serta seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari untuk terus memaksimalkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja internal dari tahun ketahun. Kemudian perbaikan data serta ketersediaan dokumen-dokumen untuk mendukung laporan kinerja juga menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan indikator ini.

3.3.1.5 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Untuk mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya tata Kelola Organisasi ini diupayakan melalui 1 (satu) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan. Realisasi anggaran untuk capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan sub Kegiatan

No	Sasaran Kinerja	Program dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6
11.	Meningkatnya akuntabilitas organisasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.552.518.850	3.211.508.562	90,40
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.582.000	40.574.500	99,98
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.584.000	36.576.500	99,98
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.998.000	3.998.000	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.690.971.612	2.370.346.914	88,09

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.650.332.612	2.329.707.914	87,90
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.149.000	26.149.000	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	4.696.000	4.696.000	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	9.794.000	9.794.000	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.000.000	24.000.000	100
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	24.000.000	24.000.000	100
		Administrasi umum Perangkat Daerah	246.122.000	239.465.341	97,30
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.044.200	15.044.200	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.475.300	51.189.200	93,97
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.511.300	19.355.750	99,20
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga	3.036.000	3.036.000	100
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.473.150	36.102.000	98,98
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	117.582.050	114.738.191	97,58
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.480.460	151.658.000	98,17
		Pengadaan mebel	38.756.610	36.558.000	94,33
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.723.850	115.100.000	99,46

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.529.728	226.155.327	96,02
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	101.708.228	96.430.827	94,81
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	133.821.500	129.724.500	96,94
		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.833.050	159.308.480	99,05
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	88.508.350	86.983.780	98,28
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	30.540.000	30.540.000	100
		Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	41.784.700	41.784.700	100,00

Sumber : Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 (diolah)

3.3.2 Sasaran 2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Desa

Indikator : Persentase Desa Mandiri

Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa dengan indikator Persentase Desa Mandiri dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.8
Indikator Persentase Desa mandiri

NO	SASARAN	SATUAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	
			URAIAN	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa	%	Persentase Desa Mandiri	40%

Pencapaian Kinerja sasaran strategis untuk indikator Persentase Desa Mandiri dapat disajikan sebagai berikut :

3.3.2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.9
Perbandingan Target dengan Realisasi pada Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN				
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa	Persentase Desa Mandiri	40%	66%	165%	Sangat Tinggi

Sumber : Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 (diolah)

Dalam tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja untuk indikator Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Sijunjung dengan target 40% (persen) telah tercapai dengan realisasi sebesar 66%(persen) dengan capaian kinerja 165%(persen) kategori **Sangat Tinggi**.

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Sijunjung dari variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa melalui IDM (Indeks Desa Membangun). Indeks Desa Membangun (IDM) dalam arti disini desa mandiri disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. Ketahanan sosial terdiri dari :

- ❖ Akses pelayanan kesehatan
- ❖ Keberdayaan masyarakat untuk kesehatan
- ❖ Jaminan kesehatan
- ❖ Akses pendidikan dasar-menengah
- ❖ Akses pendidikan non-formal
- ❖ Solidaritas sosial
- ❖ Toleransi

- ❖ Rasa aman warga desa
 - ❖ Kesejahteraan sosial
 - ❖ Akses air bersih dan layak minum
 - ❖ Akses sanitasi
 - ❖ Akses energi (listrik)
 - ❖ Akses infokom
2. Ketahanan ekonomi terdiri dari :
- Keragaman produksi
 - Pusat perdagangan
 - Distribusi logistik
 - Lembaga keuangan dan perkreditan
 - Lembaga ekonomi rakyat (Koperasi/BumDes)
 - Restoran, hotel dan penginapan
 - Keterbukaan wilayah (angkutan umum, kualitas jalan)
3. Ketahanan ekologi terdiri dari :
- Pencemaran air, tanah dan udara
 - Potensi rawan bencana
 - Tanggap/mitigasi bencana

Indeks Desa Membangun (IDM) memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial. Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut :

1. Desa Sangat Tertinggal: $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal : $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang: $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju: $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri: $IDM > 0,8155$

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024 tanggal 1 Agustus 2024 rekapitulasi status Kemajuan dan Kemandirian Desa tingkat Provinsi Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Klasifikasi Nagari/Desa Tahun 2024

Kabupaten	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah Desa
Sijunjung	41	21	-	-	-	62

Sumber : Data SK Kemendes PDTT Nomor 400 Tahun 2024

Secara rinci dapat kita lihat jumlah nagari dengan status mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal per kecamatan berdasarkan IDM tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Status Jumlah Nagari Per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah Nagari/Desa
1	IV Nagari	5	-	-	-	-	5
2	Kamang Baru	2	9	-	-	-	11
3	Koto VII	5	2	-	-	-	7
4	Kupitan	4	-	-	-	-	4
5	Lubuk Tarok	6	-	-	-	-	6
6	Sijunjung	5	4	-	-	-	9
7	Sumpur Kudus	10	1	-	-	-	11
8	Tanjung Gadang	4	5	-	-	-	9
TOTAL		41	21	-	-	-	62

Sumber : Data SK Kemendes PDTT Nomor 400 Tahun 2024

Realisasi capaian indikator Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 adalah sebesar 66% atau sebanyak 41 nagari yang terdiri dari :

Tabel 3.12
Rekapitulasi Status Nagari Mandiri

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA		IKS	IKE	IKL	NILAI IDM 2024	STATUS IDM 2024
1	TANJUNG GADANG	TANJUNG GADANG		0,9257	1,0000	0,8000	0,9086	MANDIRI
2	TANJUNG GADANG	TARATAK BARU		0,8057	0,8167	0,8667	0,8297	MANDIRI
3	TANJUNG GADANG	PULASAN		0,8914	0,6833	0,9333	0,8360	MANDIRI
4	TANJUNG GADANG	TANJUNG LOLO		0,8914	0,7833	0,800	0,8249	MANDIRI
5	SIJUNJUNG	MUARO		0,9829	1,0000	0,8667	0,9498	MANDIRI
6	SIJUNJUNG	KANDANG BARU		0,8971	0,8333	0,9333	0,8879	MANDIRI
7	SIJUNJUNG	PEMATANG PANJANG		0,9600	0,8833	0,8667	0,9033	MANDIRI
8	SIJUNJUNG	AIE ANGEK		0,7657	0,8167	0,9333	0,8386	MANDIRI
9	SIJUNJUNG	SIJUNJUNG		0,9886	0,9667	0,8667	0,9406	MANDIRI
10	IV NAGARI	PALANGKI		0,9086	0,9000	0,7333	0,8473	MANDIRI
11	IV NAGARI	KOTO BARU		0,8457	0,8167	1,0000	0,8875	MANDIRI
12	IV NAGARI	MUARO BODI		0,8229	0,8833	0,8667	0,8576	MANDIRI
13	IV NAGARI	MUNDAM SAKTI		0,8114	0,7833	0,8667	0,8205	MANDIRI
14	IV NAGARI	KOTO TUO		0,9086	0,7333	1,0000	0,8806	MANDIRI
15	KAMANG BARU	MUARO TAKUANG		0,9829	0,8167	0,6667	0,8221	MANDIRI
16	KAMANG BARU	KUNANGAN PARIK RANTANG		0,9771	0,9167	0,6000	0,8313	MANDIRI
17	LUBUAK TAROK	LUBUAK TAROK		0,8229	0,8333	0,8667	0,8410	MANDIRI
18	LUBUAK TAROK	LALAN		0,8857	0,7667	0,8667	0,8397	MANDIRI
19	LUBUAK TAROK	BULUAH KASOK		0,8171	0,7833	0,9333	0,8446	MANDIRI
20	LUBUAK TAROK	KAMPUNG DALAM		0,7429	0,7833	0,9333	0,8198	MANDIRI
21	LUBUAK TAROK	SILONGO		0,6971	0,8167	0,9333	0,8157	MANDIRI
22	LUBUAK TAROK	LATANG		0,7543	0,8333	0,8667	0,8181	MANDIRI
23	KOTO VII	LIMO KOTO		0,9200	0,9667	0,8667	0,9178	MANDIRI
24	KOTO VII	PALALUAR		0,8686	0,8333	0,9333	0,8784	MANDIRI
25	KOTO VII	GUGUAK		0,8914	0,9000	0,6667	0,8194	MANDIRI
26	KOTO VII	PADANG LAWEH		0,8457	0,8333	1,0000	0,8930	MANDIRI
27	KOTO VII	TANJUNG		0,8743	0,6667	0,9333	0,8248	MANDIRI
28	SUMPUR KUDUS	SILANTAI		0,9086	0,8500	1,0000	0,9195	MANDIRI
29	SUMPUR KUDUS	SISAWAH		0,8743	0,7833	0,8000	0,8192	MANDIRI

30	SUMPUR KUDUS	UNGGAN		0,8914	0,8000	1,0000	0,8971	MANDIRI
31	SUMPUR KUDUS	TANJUNG BONAI AUR		0,9314	0,8667	0,6667	0,8216	MANDIRI
32	SUMPUR KUDUS	SUMPUR KUDUS		0,9143	0,9000	0,8667	0,8937	MANDIRI
33	SUMPUR KUDUS	TAMPARUNGO		0,8171	0,7500	0,9333	0,8335	MANDIRI
34	SUMPUR KUDUS	KUMANIS		0,8629	0,8167	0,8667	0,8487	MANDIRI
35	SUMPUR KUDUS	MANGANTI		0,9086	0,9000	1,0000	0,9362	MANDIRI
36	SUMPUR KUDUS	SUMPUR KUDUS SELATAN		0,8629	0,8167	0,8000	0,8265	MANDIRI
37	SUMPUR KUDUS	TANJUNG LABUAH		0,7429	0,8500	0,8667	0,8198	MANDIRI
38	KUPITAN	BATU MANJULUA		0,8743	0,7667	0,8667	0,8359	MANDIRI
39	KUPITAN	PAMUATAN		0,8229	0,8833	0,8667	0,8410	MANDIRI
40	KUPITAN	PADANG SIBUSUAK		0,9429	0,9000	0,8000	0,8810	MANDIRI
41	KUPITAN	DESA KAMPUNG BARU		0,9143	0,8833	0,8667	0,8881	MANDIRI

Sumber : Data SK Kemendes PDTT Nomor 400 Tahun 2024

Kabupaten Sijunjung telah berhasil mencetak Nagari Mandiri sebanyak 41 Nagari. Dimana pendekatan dan intervensi yang dapat diterapkan pada status Nagari Mandiri berbeda dengan nagari yang bukan berstatus mandiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa, dimana Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor Kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah *kecuali* Desa yang berstatus Desa mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan :

1. Maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
2. Diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa

3.3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

3.13

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu

Sasaran	Indikator	Realisasai Kinerja dan Capaian Kinerja		
		2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa	Persentase Desa Mandiri	21%	34%	66%

Grafik 3.2

Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Desa Mandiri Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Sumber : Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 (diolah)

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa target untuk indikator Persentase Desa Mandiri pada Tahun 2022 terealisasi sebesar 21% (persen) dengan jumlah Nagari Mandiri sebanyak 13 Nagari, dan tahun 2023 terealisasi sebesar 34% (persen) dengan jumlah Nagari Mandiri sebanyak 21 Nagari. Sedangkan pada tahun 2024 jumlah Nagari Mandiri pada Kabupaten Sijunjung meningkat pesat dengan realisasi sebesar 66% dengan jumlah Nagari Mandiri sebanyak 41 Nagari. Pada tahun 2024 Kabupaten Sijunjung sudah tidak ada lagi Nagari/Desa dengan status berkembang.

Sementara itu, capaian nagari mandiri Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 dibandingkan dengan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Pengukuran IDM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

KABUPATEN	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	TOTAL
AGAM	0	0	9	41	42	92
DHARMASRAYA	0	0	8	20	24	52
KEP. MENTAWAI	0	6	24	10	3	43
KOTA PARIAMAN	0	0	0	30	25	55
KOTA SAWAHLUNTO	0	0	1	19	7	27
LIMA PULUH KOTA	0	1	1	33	44	79
PADANG PARIAMAN	0	0	37	45	21	103
PASAMAN	0	0	23	25	14	62
PASAMAN BARAT	0	1	46	35	8	90
PESISIR SELATAN	0	0	31	95	56	182
SIJUNJUNG	0	0	0	21	41	62
SOLOK	0	2	25	28	19	74
SOLOK SELATAN	0	0	5	19	15	39
TANAH DATAR		0	2	24	49	75
JUMLAH DESA/NAGARI	0	10	212	445	368	1035

Sumber : Buku IDM Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Sijunjung sesuai dengan kemajuan desanya dikategorikan sebagai kabupaten dengan status Mandiri dengan peringkat 52 secara nasional dan peringkat ke 7 (tujuh) tingkat Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat digambarkan melalui tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.15
Peringkat Provinsi Sumatera Barat IDM Status Mandiri Tahun 2024

KAB/KOTA	Desa/Nagari	IKS	IKE	IKL	NILAI IDM	STATUS IDM
Lima Puluh Kota	Sarilamak	0,9714	0,9667	1	0,9794	Mandiri
Tanah Datar	Baringin	0,9714	0,9833	0,93333	0,9627	Mandiri
Lima Puluh Kota	Situjuah Batua	0,9543	1	0,9333	0,9625	Mandiri
Dharmasraya	Sungai Rumbai Timur	0,98290	0,9667	0,9333	0,961	Mandiri
Lima puluh Kota	Mungo	0,9657	0,9833	0,9333	0,9608	Mandiri

Kota Sawahlunto	Silungkang Tigo	0,8686	1	1	0,9562	Mandiri
Sijunjung	Muaro	0,9829	1	0,8667	0,9498	Mandiri
Solok	Cupak	0,96	0,95	0,9333	0,9478	Mandiri
Agam	Lubuk Basung	0,9657	1	0,8667	0,9441	Mandiri
Solok	Muaro Paneh	0,8914	0,9333	1	0,9416	Mandiri

Sumber : Buku IDM Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat

Peningkatan indikator Persentase Desa Mandiri setiap tahunnya dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 3.16
REKAPITULASI STATUS IDM Tahun 2020-2024

STATUS	2020		2021		2022		2023		2024	
MANDIRI	4	6,56%	9	14,75%	13	21,31%	21	33,87%	41	66,13%
MAJU	18	29,51%	24	39,34%	25	40,98%	27	43,55%	21	33,87%
BERKEMBANG	39	63,93%	28	45,90%	23	37,70%	14	22,58%	0	0,00%
TERTINGGAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SANGAT TERTINGGAL	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Sumber : Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung

3.3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Terakhir Rencana Strategis

Dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan perencanaan di Kabupaten Sijunjung, salah satunya adalah dengan mengukur tingkat realisasi dari pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) di tahun 2024. Sebagai indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan perencanaan di dinas, evaluasi menjadi hal yang sangat penting untuk melihat bagaimana hasil capaian target. Evaluasi terhadap tingkat realisasi IKU Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Sijunjung serta target yang ditetapkan untuk tahun 2024 tercantum dalam tabel 3.15 berikut :

Tabel 3.17
Capaian Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian s.d Tahun 2023	Target capaian Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Target Jangka Menengah sampai dengan Tahun 2026
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa	Persentase Desa Mandiri	35%	40%	66%	53%

Berdasarkan target Rencana Strategis Tahun 2021-2026 target indikator kinerja Persentase Desa Mandiri yaitu sebesar 53% atau sebanyak 33 (tiga puluh tiga) nagari dengan status Mandiri. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Persentase Desa Mandiri tahun 2024 terhadap target jangka menengah dinilai sudah tercapai. Dimana pada jangka menengah ditargetkan pada Kabupaten Sijunjung jumlah Nagari dengan status Mandiri sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Nagari, sementara pada tahun 2024 jumlah nagari dengan status Mandiri sudah tercapai sebanyak 41 (empat puluh satu) nagari.

3.3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Provinsi dan Nasional

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, tujuan dan Indikator dari Dinas PMD adalah, Meningkatkan status Perkembangan Desa dengan Indikator tujuan adalah Jumlah Nagari/Desa Mandiri, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, dimana pengukuran target dan hasilnya di Rangking secara Nasional dan juga untuk mencapai tujuan Nasional yaitu pengentasan Desa tertinggal dan sangat tertinggal dan peningkatan status Desa Mandiri, berdasarkan rangking Nasional Provinsi Sumatera Barat berada pada Rangking 4 Nasional dan Nomor 1 di tingkat Regional

Sumatera untuk Pengentasan Desa sangat tertinggal dan Peningkatan Status Desa Mandiri, dimana pada tahun 2021 jumlah desa sangat tertinggal di Sumatera Barat ada 3 Desa, sedangkan Pada Tahun 2022 Desa Sangat Tertinggal di Sumatera Barat berhasil di entaskan hingga menjadi 0 Desa, untuk Desa Tertinggal pada Tahun 2021 terdapat 35 Desa tertinggal dan pada tahun 2022 Provinsi Sumatera Barat berhasil mengentaskan 7 Desa Tertinggal hingga kini menjadi 28 Desa Tertinggal di Sumatera Barat dengan Tolak Ukur Jumlah nagari/Desa Masih berjumlah 928 Desa/Nagari, sedangkan untuk Tahun 2023 Desa Tertinggal di Sumatera Barat tinggal 25 Desa dengan Status Tertinggal dan tolak ukur jumlah Desa/Nagari nya sebesar 929 Nagari/Desa, sedangkan untuk tahun 2024 Jumlah Tertinggal ini berkurang drastic menjadi 10 Desa/Nagari Tertinggal dengan Jumlah Total Desa/Nagari sebanyak 1035 Desa/Nagari.

Sedangkan untuk Peningkatan status Desa Mandiri pada tahun 2021 Desa Mandiri berjumlah 45 Desa/Nagari sedangkan pada Tahun 2022 terdapat 76 Desa Mandiri meningkat 59,21 % dan Tahun 2023 mennigkat Pesat menjadi 132 Desa dengan klasifikasi Mandiri, Untuk Tahun 2024 Total Nagari mandiri Menjadi sebesar 368 Nagari/Desa sesuai dengan perangkingan nasional yang tertera pada situs “<https://www.idm.kemedesa.go.id>” berikut nilai dari IDM Provinsi Sumatera Barat :



Keterangan: ● Berkembang ● Maju

Berdasarkan table diatas dapat dilihat juga bahwa, pada Tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kemajuan Desa-nya dikategorikan sebagai Provinsi yang berkembang tetapi pada tahun tahun 2024 klasifikasi ini naik menjadi Provinsi Maju, walupun secara peringkat terjadi penurunan.

3.3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Capaian Indikator Persentase Desa Mandiri

Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator

Penyebab keberhasilan capaian indikator Persentase Desa Mandiri didukung dengan semakin meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah nagari melalui pembinaan serta sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, serta adanya dukungan anggaran dari APBD melalui Anggaran Dana Nagari (ADN) dan anggaran dari pusat melalui Dana Desa (DD).

Selain itu, tingginya dukungan dan intervensi dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terhadap tiga indikator Indeks Desa Membangun yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Lingkungan dan Indeks Ketahanan Ekonomi. Dimana ketiga indikator tersebut tidak dapat dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari secara mandiri namun perlu adanya dukungan dan intervensi dari Perangkat Daerah terkait terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian indikator Persentase Desa Mandiri. Serta adanya pendampingan oleh tenaga pendamping local desa (PLD) dan tenaga pendamping desa (PD) dalam pengisian kuisisioner IDM secara benar dan sesuai fakta data dilapangan dimasing-masing nagari.

Gambar 3.1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan BPN





✚ **Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja:**

1. Masalah topologi wilayah
2. Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan
3. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat
5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kemandirian desa dapat menghambat upaya mewujudkan desa mandiri
6. Akses terbatas terhadap infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih dan fasilitas umum lainnya dapat menghambat mobilitas masyarakat dan akses terhadap layanan publik
7. Infrastruktur yang belum memadai yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi desa
8. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan

9. Minimnya ketersediaan anggaran.

 Strategi Pemecahan Masalah Pencapaian Indikator:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pembinaan dan pengembangan kompetensi
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
3. Pengembangan infrastruktur dengan membangun infrastruktur yang memadai dan berkualitas serta menjamin aksesibilitas bagi seluruh masyarakat
4. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui edukasi, pelatihan dan penerapan teknologi tepat guna
5. Peningkatan infrastruktur di nagari dalam rangka penanganan topologi wilayah, peningkatan anggaran dengan adanya penyaluran dana desa dari pusat langsung ke nagari dengan skala prioritas setiap tahunnya untuk mendukung pembangunan dalam mencapai peningkatan indikator IDM menuju nagari mandiri
6. Adanya peranan Pemerintah Daerah dalam mengarahkan penggunaan dana desa untuk memenuhi capaian indikator utama IDM serta peranan pemerintah dalam peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur nagari dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat nagari
7. Peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di nagari
8. Penambahan anggaran dalam rangka pembinaan nagari untuk mewujudkan nagari mandiri.

13.3.2.2 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Sasaran Persentase Desa Mandiri diupayakan melalui 3 program, 3 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Untuk lebih jelas anggaran dan realisasi masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.18
Program dan Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator
Persentase Desa Mandiri

No	Sasaran Kinerja	Program dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	7.987.000	7.851.450	98,30
		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	7.987.000	7.851.450	98,30
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	7.987.000	7.851.450	98,30
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.029.094.770	1.977.825.905	97,47
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.029.094.770	1.977.825.905	97,47
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	84.356.600	82.958.850	98,34
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5.000.000	4.177.400	83,55
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	86.374.500	79.723.450	92,30
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.224.186.720	1.216.807.538	99,40
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	379.613.200	366.302.820	96,50
		Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	17.697.800	17.465.400	98,69
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	63.460.000	61.168.850	96,39
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	17.029.750	14.240.850	83,62
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	420.000	415.000	98,81
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	25.268.500	16.556.400	65,52

	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	91.286.350	89.115.347	97,62
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	20.868.000	16.274.100	77,99
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	3.999.800	3.949.350	98,74
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9.533.550	8.670.550	90,95
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.020.766.850	953.245.091	93,39
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.020.766.850	953.245.091	93,39
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	107.066.850	106.831.050	99,78
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	913.700.000	846.414.041	92,64

Sumber: Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung Tahun 2024

3.3.3 Sasaran 3 Meningkatkan kualitas lembaga adat

Indikator : Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif

Sasaran meningkatnya kualitas lembaga adat dengan indikator Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif, Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Lembaga Adat yang Aktif

NO	SASARAN	SATUAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	
			URAIAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas lembaga adat	%	Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif	6%

Pencapaian kinerja sasaran strategis untuk indikator Persentase Peningkatan Lembaga Adat yang Aktif dapat disajikan sebagai berikut :

3.3.3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.20
Perbandingan Target dengan Realisasi pada Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN				
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya kualitas lembaga adat	Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif	6%	16%	267%	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian persentase peningkatan lembaga adat yang aktif dengan realisasi sebesar 16%, dengan target yang ditetapkan sebesar 6% dengan capaian sebesar 267% dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Pada tahun 2024 dari total keseluruhan KAN sebanyak 49 lembaga KAN yang ada di Kabupaten Sijunjung sudah dikategorikan aktif dan sangat aktif, ini dilihat dari berbagai aspek indikator penilaian, antara lain:

1. Legalitas kelembagaan
2. Sarana dan prasarna
3. Administrasi kelembagaan
4. Pelatihan yang pernah di ikuti pengurus dan anggota dalam satu tahun
5. Keterlibatan dalam pemerintah
6. Sumber pendanaan lembaga KAN

7. Dukungan keterlibatan Mandeh Suku
8. Keterlibatan dalam program dan kegiatan Nagari/Desa
9. Penggalian dan menggagas inovasi
10. Urusan-urusan yang ditangani
11. Kolaborasi dan kerjasama dengan lembaga lainnya di dalam dan diluar Nagari/Desa

Dari indikator tersebut diatas, ditetapkan klasifikasi lembaga KAN dengan skor sebagai berikut :

1. ≤ 69 = Kurang aktif
2. $70 - 89$ = Aktif
3. ≥ 90 = Sangat Aktif

Dari klasifikasi diatas yang dinilai dengan beberapa aspek indikator penilaian ditetapkan Lembaga KAN yang aktif adalah yang memiliki skor 70-89 dan Lembaga KAN yang sangat aktif dengan skor ≥ 90 . Pada tahun 2024 dari 49 KAN yang ada di Kabupaten Sijunjung yang memiliki skor 70-89 adalah sebanyak 31 lembaga, dan lembaga KAN yang memiliki skor ≥ 90 dengan kategori sangat aktif adalah sebanyak 18 lembaga KAN, artinya dari 49 lembaga KAN yang ada di Kabupaten Sijunjung seluruhnya sudah dikategorikan aktif.

Tabel 3.21
Daftar Lembaga KAN yang Aktif dan Sangat Aktif Tahun 2024

NO	KECAMATAN	NAGARI	SKOR	KET
1	SIJUNJUNG	SILOKEK	94	Sangat Aktif
		SOLOK AMBAH	74	Aktif
		AIE ANGEK	94	Sangat Aktif
		SIJUNJUNG	87	Aktif
		DURIAN GADANG	95	Sangat Aktif
		PEMATANG PANJANG	87	Aktif
		KANDANG BARU	78	Aktif
		MUARO	74	Aktif
		PARU	75	Aktif

2	TANJUNG GADANG	TANJUNG GADANG	87	Aktif
		LANGKI	86	Aktif
		TARATAK BARU DAN TARATAK BARU UTARA	76	Aktif
		PULASAN	94	Sangat Aktif
		SIBAKUR	73	Aktif
		TANJUNG LOLO	74	Aktif
		TIMBULUN DAN SINYAMU	79	Aktif
3	KAMANG BARU	LUBUK TARANTANG	89	Aktif
		PADANG TAROK	76	Aktif
		AIA AMO, TANJUNG KALIANG DAN MALORO	75	Aktif
		KUNPAR	71	Aktif
		SUNGAI BETUNG	90	Sangat Aktif
		MUARO TAKUANG	110	Sangat Aktif
		SUNGAI LANSEK DAN SIAUR	98	Sangat Aktif
		KAMANG	70	Aktif
4	IV NAGARI	MUNDAM SAKTI	98	Sangat Aktif
		PALANGKI	80	Aktif
		KOTO TUO	86	Aktif
		MUARO BODI	84	Aktif
		KOTO BARU	96	Sangat Aktif
5	LUBUK TAROK	BULUH KASOK DAN SILONGO	76	Aktif
		KAMPUNG DALAM	73	Aktif
		LUBUK TAROK DAN LATANG	90	Sangat Aktif
		LALAN	82	Aktif
6	SUMPUR KUDUS	KUMANIS	92	Sangat Aktif
		TBA dan TBA SELATAN	78	Aktif

		MANGANTI	94	Sangat Aktif
		TAMPARUNGO dan TANJUNG LABUAH	86	Aktif
		SILANTAI	100	Sangat Aktif
		UNGGAN	95	Sangat Aktif
		SISAWAH	83	Aktif
		SUMPUR KUDUS dan SUMPUR KUDUS SELATAN	80	Aktif
7	KUPITAN	PAMUATAN	107	Sangat Aktif
		PADANG SIBUSUK DAN KAMPUNG BARU	95	Sangat Aktif
		BATU MANJULUR	90	Sangat Aktif
8	KOTO VII	PALALUAR	78	Aktif
		GUGUAK	77	Aktif
		LIMO KOTO DAN BUKIT BUAL	70	Aktif
		TANNJUNG	74	Aktif
		PADANG LAWEH DAN PADANG LAWEH SELATAN	90	Sangat Aktif
	TOTAL			41

Sumber : Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 (diolah)

3.3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sasaran Persentase Peningkatan Lembaga Adat yang aktif yang telah dicapai pada tahun 2024, dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Tabel. 3.22
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024
dengan Tahun Lalu

Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
Meningkatnya kualitas lembaga adat	Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif	6%	10%	6%	8%	6%	16%

Grafik 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024
dengan Tahun Lalu



Sumber : Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa target untuk indikator Persentase Peningkatan Lembaga Adat yang Aktif diharapkan mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 6% (3 lembaga adat), artinya dari 37 lembaga adat yang aktif pada tahun 2022 diharapkan setiap tahunnya lembaga adat yang aktif bertambah sebanyak 3 lembaga adat. Pada tahun 2023 lembaga adat yang aktif terealisasi sebesar 8% (4 lembaga) dari target yang ditetapkan sebesar 6% (3 lembaga). Sehingga pada tahun 2023 jumlah lembaga adat yang aktif adalah sebanyak 41 lembaga. Sedangkan tahun 2024 lembaga adat yang aktif meningkat

pesat dengan realisasi sebesar 16% (8 lembaga), artinya pada tahun 2024 total lembaga adat yang aktif sebanyak 49 KAN, artinya seluruh KAN yang ada di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2024 di nilai sudah aktif sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan.

3.3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Terakhir Rencana Strategis

Pengukuran pencapaian tingkat sasaran indikator Persentase Peningkatan Lembaga Adat yang Aktif didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Tabel 3.20 menggambarkan tingkat pencapaian realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target terakhir rencana strategis yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi. Pada akhir rencana strategis organisasi di targetkan capaian indikator Persentase Peningkatan Lembaga Adat yang Aktif meningkat sebesar 6% atau sebanyak 3 Lembaga KAN yang aktif, sehingga pada akhir rencana strategis ditargetkan seluruh Lembaga KAN yang ada di Kabupaten Sijunjung semuanya sudah aktif.

Tabel 3.23
Capaian Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian s.d Tahun 2023	Target capaian Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	Target Rencana strategis sampai dengan Tahun 2026
1	Meningkatnya kualitas lembaga adat	Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif	6%	6%	16%	6%

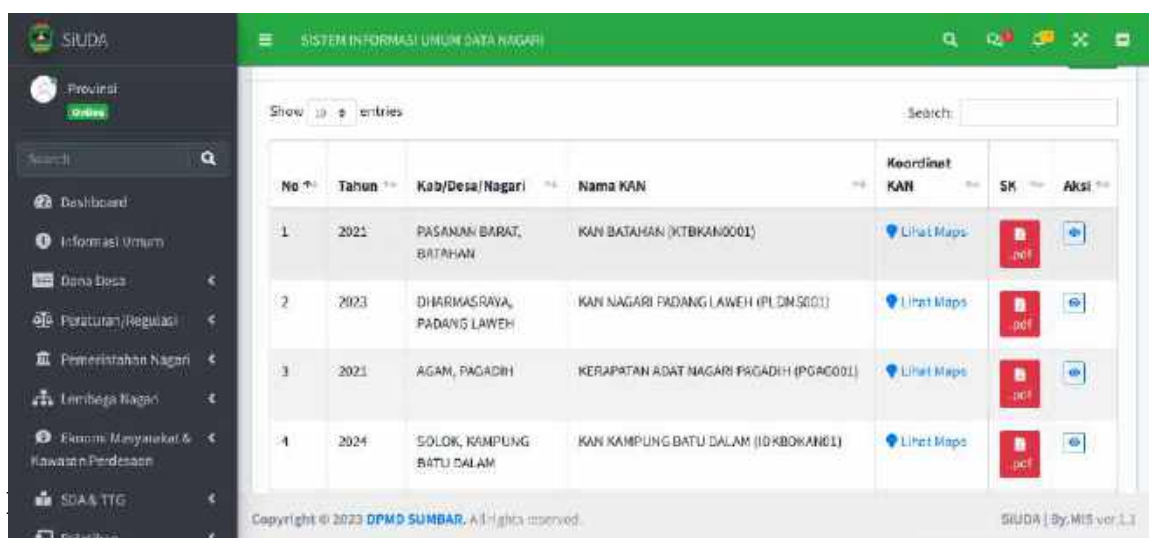
3.3.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Provinsi

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung dengan standar Provinsi tidak bisa dilakukan, karena Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMD Provinsi

Sumatera Barat adalah "Jumlah KAN Aktif", sementara DPMN Kabupaten Sijunjung menargetkan jumlah peningkatan lembaga adat yang aktif setiap tahunnya.

Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat memiliki target untuk jumlah lembaga adat yang aktif pada tahun 2024 sebesar 450 KAN , terealisasi sebesar 450 KAN tingkat capaian 100 % termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Untuk Data capaian Rekapitulasi KAN Aktif dapat dilihat di www.siuda.p3pdsambar.id, sebagai berikut :



No	Tahun	Kab/Desa/Nagari	Nama KAN	Koordinat KAN	SK	Aksi
1	2021	PASAMAN BARAT, BATAHAN	KAN BATAHAN (KTBKAN001)	Lihat Maps	pdf	
2	2023	DHARMASRAYA, PADANG LAWEH	KAN NAGARI PADANG LAWEH (PLDN.S001)	Lihat Maps	pdf	
3	2021	AGAM, PAGADIH	KERAPATAN ADAT NAGARI PAGADIH (PGAD001)	Lihat Maps	pdf	
4	2024	SOLOK, KAMPUNG BATU DALAM	KAN KAMPUNG BATU DALAM (DKBKAN001)	Lihat Maps	pdf	

kelengkapan lainnya, sedangkan untuk hard copy Surat keputusannya telah terkumpul di Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat, Kemudian Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan keaktifan KAN untuk berperan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan berupa bimbingan teknis Masyarakat Hukum Adat, rapat kerja pengurus KAN se Sumatera Barat serta pilot project Nagari Model Desa Adat percontohan. Selain itu juga untuk

meningkatkan motivasi dan semangat pengurus KAN juga dilakukan penilaian KAN tingkat Provinsi Sumatera Barat, bagi pemenang KAN terbaik tingkat provinsi diberikan penghargaan serta hadiah.

3.3.3.5 Analisis penyebab keberhasilan capaian Indikator Kinerja

Penyebab keberhasilan pencapaian indikator

Salah satu faktor pendukung keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan lembaga adat yang aktif adanya kerjasama yang baik antara pemerintahan nagari dengan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Mengingat tanggung jawab pembinaan kehidupan bermasyarakat (beradat) dan beragama, bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah daerah, namun juga menjadi tanggungjawab multi *stakeholders* di daerah ini, baik ulama, tokoh adat serta masyarakat. Pemerintah nagari menyadari bahwa KAN sebagai lembaga yang menaungi para ninik mamak (penghulu adat) di nagari, maka peran lembaga KAN akan memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam upaya pemasyarakatan nilai-nilai adat ditengah kehidupan masyarakat nagari.

Selain itu keberhasilan juga didukung dengan adanya pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pemberdayaan terutama legalitas kelembagaan, administrasi kelembagaan, aturan yang harus dibuat oleh lembaga adat dan mendorong lembaga adat untuk melestarikan adat kepada anak cucu kemenakan. Serta adanya peningkatan kapasitas bagi lembaga adat terkait dengan tugas dan fungsinya, dan adanya bantuan biaya operasional untuk pemangku adat se Kabupaten.

Gambar 3.2
Pembinaan, pendampingan, bimbingan dalam pembuatan administrasi
kelembagaan kepada pengurus Kerapatan Adat Nagari



✚ **Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator:**

1. Masih rendahnya kemauan dari pengurus KAN untuk mengetahui dan membuat administrasi kelembagaan.
2. Belum berfungsinya secara maksimal kelembagaan KAN dalam mengembangkan keorganisasiannya, sehingga keberadaan

lembaga KAN hanya sebagai pelengkap kelembagaan yang ada di nagari saja.

3. Kurangnya perhatian pengurus KAN dalam mengurus organisasinya
4. Masih rendahnya kapasitas SDM lembaga adat
5. Masih terbatasnya ketersediaan anggaran
6. Kurangnya keinginan dan kemauan lembaga adat untuk menggali dan melestarikan ilmu adat kepada anak cucu kemenakan
7. Kurangnya sarana prasarana berupa kantor yang dimiliki oleh KAN

 Strategi pemecahan masalah dalam pencapaian indikator:

1. Melakukan penilaian terhadap Lembaga KAN sehingga dapat mendorong para pengurus KAN untuk berbenah dalam mengurus organisasinya, sehingga eksistensi KAN akan semakin dirasakan masyarakat nagari dalam mengaktualisasikan nilai-nilai adat di nagari sebagai salah satu manifestasi filosofi “Adat Basandi Syarak –Syarak Basandi Kitabullah” (ABS-SBK) di tengah-tengah masyarakat
2. Pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM lembaga KAN secara berkelanjutan
3. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan berbagai pihak terkait, untuk bersama-sama melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap kelambagaan bersama-sama melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap kelambagaank bersama-sama melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap kelambagaan adat.
4. Pengalokasian anggaran secara rutin untuk peningkatan kapasitas lembaga adat
5. Perlu adanya bangunan kantor untuk KAN secara permanen dan milik sendiri

3.3.3.6 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Sasaran meningkatnya kualitas lembaga adat diupayakan melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Realisasi anggaran untuk mendukung tercapainya sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.24
Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran
Meningkatnya Kualitas Lembaga Adat

No	Sasaran Kinerja	Program dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Lembaga Adat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	840.536.450	833.200.950	99,13
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	840.536.450	833.200.950	99,13
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	66.189.500	65.292.850	98,65
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	774.346.950	767.908.100	99,17

Sumber : Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung Tahun 2024

3.4 REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan Kebijakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung tahun 2024, didukung dengan dana sejumlah **Rp.7.450.903.920,-**. Alokasi belanja sebesar **Rp. 6.983.631.958,-**.

Anggaran Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari merupakan bagian dari APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2024, komposisi belanja APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari kabupaten Sijunjung sebagai berikut:

Tabel 3.25
Pagu dan Realisasi Anggaran/Program (Belanja)
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2024

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Kinerja	
			Keuangan		Target	Capaian
			(RP)	(%)		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.552.518.850	3.211.508.562	90,40	85%	100%
a	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.582.000	40.574.500	99,98	85%	85%
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.584.000	36.576.500	99,98	2 dok	2 dok
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.998.000	3.998.000	100	3 dok	3 dok
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.690.971.612	2.370.346.914	88,09	95%	95%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.650.332.612	2.329.707.914	87,90	24 org	23 org

2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.149.000	26.149.000	100	3 dok	3 dok
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	4.696.000	4.696.000	100	1 dok	1 dok
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	9.794.000	9.794.000	100	13 dok	13 dok
c	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	24.000.000	24.000.000	100	90%	90%
1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	24.000.000	24.000.000	100	49 pkt	49 pkt
d	Administrasi umum Perangkat Daerah	246.122.000	239.465.341	97,30	90%	90%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.044.200	15.044.200	100	1 pkt	1 pkt
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.475.300	51.189.200	93,97	1 pkt	1 pkt
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.511.300	19.355.750	99,20	2 pkt	2 pkt
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.036.000	3.036.000	100	1 dok	1 dok
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	36.473.150	36.102.000	98,98	1 lap	1 lap
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.582.050	114.738.191	97,58	90 lap	120 lap
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.480.460	151.658.000	98,17	80%	80%
1	Pengadaan Mebel	38.756.610	36.558.000	94,33	12 unit	12 unit
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.723.850	115.100.000	99,46	9 unit	9 unit
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.529.728	226.155.327	96,02	80%	90%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi,	101.708.228	96.430.827	94,81	8 lap	8 lap

	Sumber Daya Air dan Listrik					
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.821.500	129.724.500	96,94	1 lap	1 lap
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.833.050	159.308.480	99,05	80%	90%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.508.350	86.983.780	98,28	15 unit	15 unit
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.540.000	30.540.000	100	50 unit	50 unit
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.784.700	41.784.700	1 pkt	1 pkt	1 unit
II	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	7.987.000	7.851.450	98,30	5%	5%
a	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	7.987.000	7.851.450	98,30	1 dok	1 dok
1	Fasilitasi kerjasama antar desa dalam	7.987.000	7.851.450	98,30	1 dok	1 dok
III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.029.094.770	1.977.825.905	97,47	82 45% 59% 50%	84,62 45% 59% 50%
a	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.029.094.770	1.977.825.905	97,47	14,5% 100% 70% 80% 50% 73 % 90% 90%	18% 100% 70% 80% 50% 73% 90% 90%
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	84.356.600	82.958.850	98,34	62 dok	62 dok
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5.000.000	4.177.400	83,55	1 dok	1 dok

3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	86.374.500	79.723.450	92,30	62 dok	62 dok
4	Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa	1.224.186.720	1.216.807.538	99,44	62 dok	62 dok
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	379.613.200	366.302.802	96,50	143 org	143 org
6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	17.697.800	17.465.400	98,69	1 lap	1 lap
7	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	63.460.000	61.168.850	96,39	1 dok	1 dok
8	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	17.029.750	14.240.850	83,62	1 lap	1 lap
9	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	25.268.500	16.556.400	65,52	62 dok	62 dok
10	Pembinaan Peningkatan Kapasitas anggota BPD	91.286.350	89.115.347	97,62	30 org	30 org
11	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	20.868.000	16.274.100	77,99	2 Nagari	2 Nagari
12	Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	3.999.800	3.949.350	98,74	1 lap	1 lap
13	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9.533.550	8.670.550	90,95	1 dok	1 dok
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.861.303.300	1.786.446.041	95,98	65% 50% 84%	65% 50% 84%
a	Pemberdayaan Lembaga	1.861.303.300	1.786.446.041	95,98	65% 50%	65% 50%

	Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				49 KAN	49 KAN
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	66.189.500	65.292.850	98,65	1 dok	1 dok
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	774.346.950	767.908.100	99,17	4 lembaga	4 lembaga
3	Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat	107.066.850	106.831.050	99,78	1 lap	1 lap
4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	913.700.000	846.414.041	92,64	1 dok	1 dok
	TOTAL	7.450.903.920	6.983.631.958	93.73		

Sumber: Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2024.

3.4.1 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyuyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.26
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Capaian Kinerja/ Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran untuk pencapaian Sasaran	Persentase Efektifitas capaian Kinerja/ Sasaran ≥ 100% 5=(3-4)	Program/Sub Kegiatan Pendukung
1	2	3	4	5=(3-4)	6
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaa n desa	165	96,11	68,89	Program Peningkatan Kerjasama Desa Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 1. Fasilitasi kerjasama antar desa dalam Kabupaten/Kota Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1.Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.Fasilitasi penyusunan produk hukum desa 3.Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 4.Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa 5.Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur

					Pemerintah Desa 6. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 7. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa 8. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 9. Fasilitasi penyusunan profil desa 10. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 11. Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD 12. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 13. Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa 14. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat 2. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga
2.	Meningkatnya Kualitas Lembaga Adat	267	99,13	167,87	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan

					Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,P KK, Posyandu,LPM dan KarangTaruna),Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat hukum adat 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KemasyarakatanDesa/Kelurahan LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat hukum Ada
--	--	--	--	--	---

Sumber : Data Dinas PMN Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 (diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui efesiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Dari 3 (tiga) sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100%, ini menunjukkan bahwa efesiensi anggaran telah mencapai tingkat yang sangat tinggi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD, ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sijunjung selama Tahun 2024. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa mendatang.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung merupakan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2024, termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan selama Tahun 2024, di samping memberikan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2024 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di Tahun berikutnya. Berpijak pada hasil pengukuran dan penilaian kinerja dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan strategis disusun mengacu pada program kebijakan daerah dengan mengakomodasikan kebutuhan daerah sehingga sangat bermanfaat bagi penyelenggara pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
2. Dari hasil pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan sasaran, program dan kebijakan menunjukkan penilaian yang sangat tinggi, yakni dengan rata-rata di atas 100% dengan berbagai asumsi dan interpretasi
3. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari pada tahun 2024 termasuk kategori Sangat Tinggi.
4. Khusus untuk kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan (Total Belanja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung tahun 2024 adalah sebesar 93,73%.

4.2 LANGKAH-LANGKAH DI MASA MENDATANG

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka langkah langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung guna mencapai tujuan dan sasaran di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
2. Melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder, dan mengusulkan anggaran yang cukup untuk mendukung Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Adanya komitmen yang tinggi serta konsistensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung untuk mencapai sasaran strategis serta target kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian penutup dari laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2024 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya.

Dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Sijunjung Tahun 2024, diharapkan akan menjadi evaluasi program secara keseluruhan terutama dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026.

Muaro Sijunjung, Januari 2025

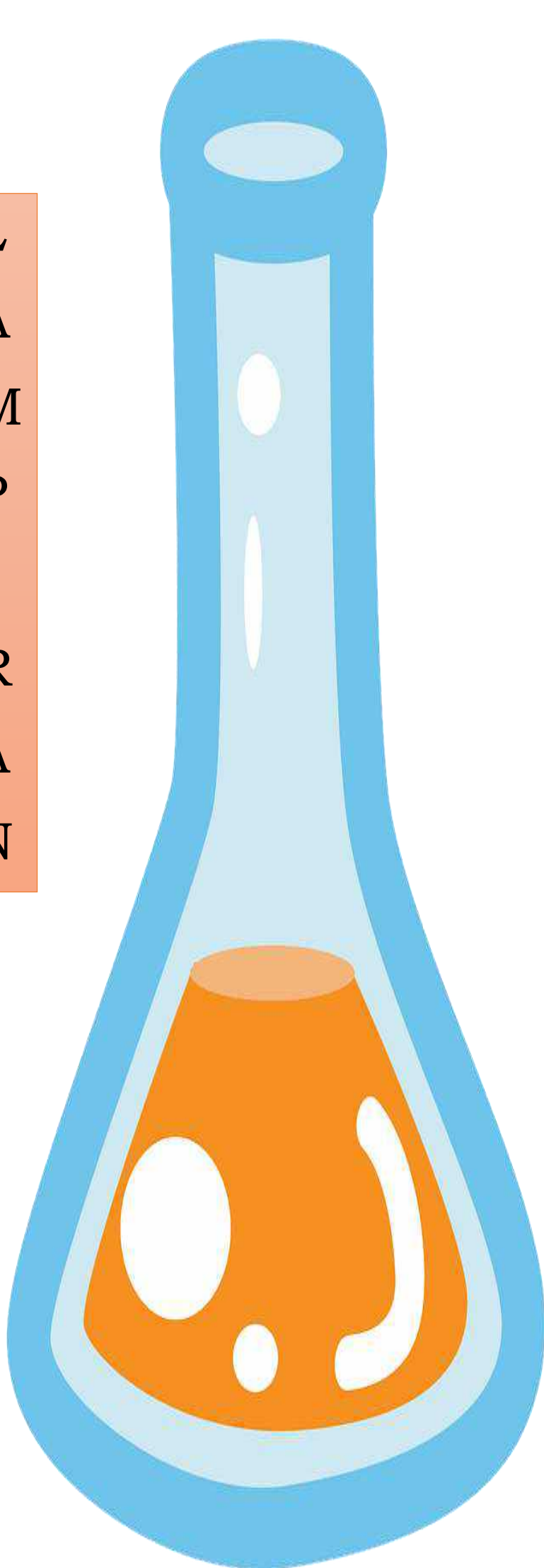
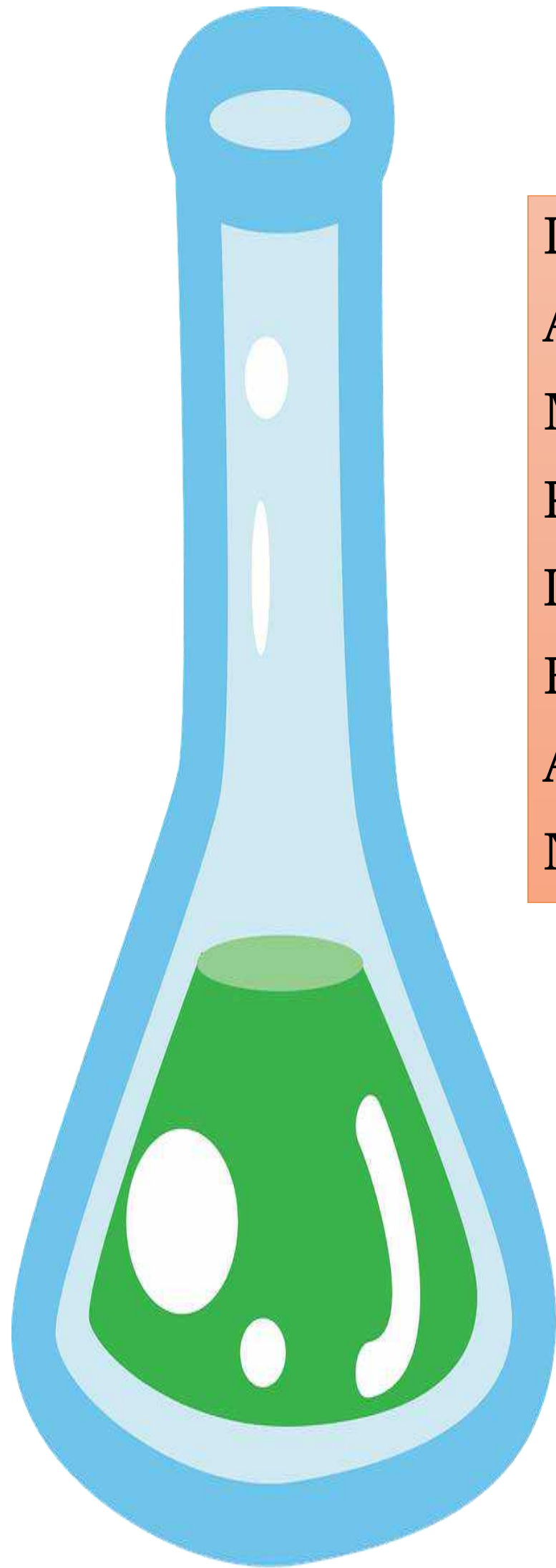
Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Nagari



ION ANTONIUS, S.Hut.T
Pembina TK I (IV/b)

NIP. 19780507 199803 1 004

L
A
M
P
I
R
A
N





PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Alamat: Jln. Prof. M. Yamin SH Nomor 11 Telp (0754) 20083 Muaro Sijunjung 27511
Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> email: dpmn@sijunjung.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG**

NOMOR : 800/ *033* /DPMN/2024

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada

Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 – 2026.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI



JONI ANTONIUS, S.Hut.T
NIP. 19780507 199803 1 004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
Nomor : 800/049 / DPMN/2024
Tanggal : 05 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai	untuk mendukung target RPJMD	Nilai Evaluasi	Hasil Evaluasi Inspektorat	Indek komposit yang mengukur kualitas perencanaan daerah yang berdasarkan proses, isi dan tindak lanjut perencanaan daerah
2.	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan dan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa Mandiri	%	pencapaian Indikator kinerja Kunci sesuai Permendagri 18 tahun 2020	Jumlah Desa mandiri Tahun N/Jumlah Desa x 100	Kemendes PDTT	Nagari/desa yang difasilitasi untuk menjadi nagari mandiri
3.	Meningkatnya Kualitas Lembaga Adat	Persentase Peningkatan Lembaga Adat yang Aktif	%	untuk memenuhi tujuan Pembangunan Desa sesuai UU No 06 Tahun 2014 dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat	Jumlah lembaga adat yang mampu melaksanakan fungsi kelembagaannya/Jumlah lembaga adat x 100	DPMN	Lembaga adat yang menjalankan fungsi kelembagaan

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada Tanggal : 05 Januari 2024





PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JONI ANTONIUS, S.Hut.T

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BENNY DWIFA YUSWIR

Jabatan : Bupati Sijunjung

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Bupati Sijunjung

BENNY DWIFA YUSWIR

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

JONI ANTONIUS, S.Hut.T
NIP. 197003011998031004

PERJANJIAN KINERJA ESELON II
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran Strategis SKPD	Indikator Kinerja Utama SKPD	Target SKPD
Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja organisasi	78,50
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa Mandiri	40%
Meningkatnya kualitas lembaga adat	Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif	6%

Program	Anggaran	Keterangan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 3.690.399.903,-	
Kerjasama Desa	Rp. 25.000.000,-	
Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 2.195.634.850,-	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.974.443.800,-	
Jumlah	Rp. 7.885.478.553,-	

Muaro Sijunjung, Januari 2024



PIHAK KEDUA
Bupati Sijunjung

BENNY DWIFA YUSWIR



PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

ANTONIUS, S.Hut.T
Np. 007 199803 1 004

Telah Diverifikasi / Reviu / Evaluasi				
PIC	Bappeda	Bagor	Inspektorat	Sekda
<i>[Signature]</i> 27/24 3	<i>[Signature]</i> 27/3/24	<i>[Signature]</i> 27/24 3	<i>[Signature]</i> 27/3-24	<i>[Signature]</i>



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DELFI SUNAIRI, SE

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : JONI ANTONIUS, S.Hut.T

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari


JONI ANTONIUS, S.Hut.T
NIP. 19780507 199803 1 004

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari


DELFI SUNAIRI, SE
NIP. 19730902 200312 2 003

PERJANJIAN KINERJA ESELON III
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan
Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja organisasi	78,50
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran OPD	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran	85%
2. Meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Kinerja	Persentase dokumen pelaporan dan perencanaan yang disampaikan tepat waktu	95%
3. Meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan	Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	95%
4. Meningkatkan kualitas pengendalian pertanggung jawaban keuangan internal organisasi	Persentase SPJ dengan administrasi lengkap sesuai aturan	100%
5. Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%
	Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi	100%
6. Meningkatkan pengelolaan Aset OPD	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%
	Persentase Aset OPD dalam keadaan baik	80%
7. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase pelayanan urusan kepegawaian yang diproses tepat waktu	100%

Program	Anggaran	Keterangan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 3.690.399.903,-	
1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 43.773.000,-	
2. Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp. 2.644.606.943,-	
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp. 25.000.000,-	

4. Administrasi umum perangkat daerah	Rp. 329.071.450,-	
5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Rp. 162.480.460,-	
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 291.245.000,-	
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 194.223.050,-	
Jumlah	Rp. 3.690.399.903,-	

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari


JONI ANTONIUS, S.Hut.T
NIP. 19780507 199803 1 004

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari


DELFI SUNAIRI, SE
NIP. 19730902 200312 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAGHDALENA, S.TP
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Masyarakat
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : JONI ANTONIUS, S.Hut.T
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari


JONI ANTONIUS, S.Hut.T
NIP. 19780507 199803 1 004

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat


MAGHDALENA, S.TP
NIP. 19740824 200804 2 001

PERJANJIAN KINERJA ESELON III
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan
Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Desa	Persentase BUMNAG/BUMDESMA yang berkontribusi terhadap PAN	59%
1. Meningkatkan pembinaan BUMNAG/BUMDESMA	Persentase BUMNAG/BUMDESMA yang dibina	59%
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	65%
	Persentase usaha ekonomi masyarakat yang aktif	50%
1. Meningkatkan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina	65%
	Persentase usaha ekonomi masyarakat yang dibina	50%
Meningkatnya Pemberdayaan lembaga adat	Persentase lembaga adat yang aktif	84%
1. Meningkatkan pembinaan lembaga adat	Jumlah lembaga adat yang dibina	49 KAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 82.200.000,-	
1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp. 82.200.000,-	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.854.444.000,-	
1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat	Rp. 1.854.444.000,-	



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III
KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FEBY HENDRA MUKHLIS, S.Kom,M.I.Kom

Jabatan : Kabid Keuangan dan Pembangunan Nagari

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : JONI ANTONIUS, S.Hut.T

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

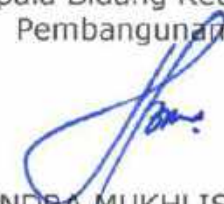
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari


JONI ANTONIUS, S.Hut.T
NIP. 19780507 199803 1 004

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Keuangan dan
Pembangunan Nagari


FEBY HENDRA MUKHLIS, S.Kom.M.I.Kom
NIP. 19840903 201001 1 019

PERJANJIAN KINERJA ESELON III
KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NAGARI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan
Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Desa	Indeks transparansi dana desa	82%
1. Meningkatnya pembinaan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset desa/nagari	Persentase penyusunan dokumen perencanaan nagari sesuai aturan	73%
	Persentase nagari yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	90%
	Persentase nagari yang menyampaikan laporan aset tepat waktu	90%
a. Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Jumlah laporan penyelenggaraan musyawarah desa	1 Laporan
b. Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 1.396.434.900,-	
Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp. 1.396.434.900,-	
Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Rp. 119.999.800,-	
Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat pelakunya hukum adat	Rp. 119.999.800,-	

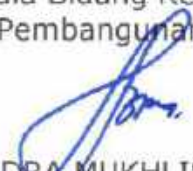
yang sama dalam daerah kabupaten/kota		
Jumlah	Rp. 1.516.434.700,-	

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari


JONI ANTONIUS, S.Hut.T
NIP. 19780507 199803 1 004

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Keuangan dan
Pembangunan Nagari


FEBY HENDRA MUKHLIS, S.Kom.M.I.Kom
NIP. 19840903 201001 1 019



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN, SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN NAGARI DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENDRA SYAFRIONO PUTRA, S.IP

Jabatan : Kabid Pemerintahan Nagari

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : JONI ANTONIUS, S.Hut.T

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari


JONI ANTONIUS, S.Hut.T
NIP. 19780507 199803 1 004

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Pemerintahan Nagari


HENDRA SYAFRIONO PUTRA, S.IP
NIP. 19870313 200701 1 001

PERJANJIAN KINERJA ESELON III
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN NAGARI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Program
Meningkatnya kerjasama Desa	Persentase peningkatan kerjasama desa	5%
1. Meningkatkan fasilitasi kerjasama desa	Persentase kerjasama desa yang difasilitasi	33%
Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Desa	Persentase administrasi pemerintahan nagari yang berkinerja baik	45%
1. Meningkatkan pembinaan administrasi pemerintahan desa/nagari	Persentase aparatur pemerintahan desa/nagari yang memiliki kompetensi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan nagari	15%
	Persentase nagari yang memiliki nilai evaluasi pemerintahan nagari dengan skor 90	100%
	Persentase nagari yang menyampaikan laporan tepat waktu	70%
	Persentase nagari yang memiliki nilai evaluasi perkembangan nagari dengan kategori berkembang	80%
	Persentase nagari yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	50%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 25.000.000,-	
1. Fasilitasi kerjasama antar desa	Rp. 25.000.000,-	
Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 716.999.950-	

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp. 716.999.950-	
Jumlah	Rp. 741.999.950,-	

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari



JONI ANTONIUS, S.Hut.T
NIP. 19780507 199803 1 004

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang
Pemerintahan Nagari



HENDRA SYAFRIONO PUTRA, S.IP
NIP. 19870313 200701 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN, SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id>

Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI MUDA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YULIA ASTUTI, A.Md

Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli
Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HENDRA SYAFRIONO PUTRA, S.IP

Jabatan : Kabid Pemerintahan Nagari

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pemerintahan Nagari

HENDRA SYAFRIONO PUTRA, S.IP
NIP. 19870313 200701 1 001

PIHAK PERTAMA

Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
Ahli Muda

YULIA ASTUTI, A. Md
NIP. 19780709 200212 2 004

PERJANJIAN KINERJA ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah nagari	Jumlah aparatur pemerintah nagari yang mengikuti peningkatan kapasitas	130 orang
Terlaksananya peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Nagari	Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang mengikuti peningkatan kapasitas	35 orang
Terlaksananya monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah nagari	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah nagari	2 dokumen

Program

Anggaran

Keterangan

Jumlah

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemerintahan Nagari



HENDRA SYAFRIONO PUTRA, S.IP
NIP. 19870313 200701 1 001

PIHAK PERTAMA
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
Ahli Muda



YULIA ASTUTI, A. Md
NIP. 19780709 200212 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUSTAR, SH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DELFI SUNAIRI, SE
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

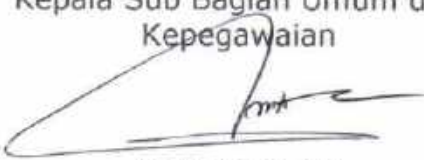
Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari


DELFI SUNAIRI, SE

NIP. 19730902 200312 2 003

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian


AGUSTAR, SH

NIP. 19740812 200003 1 005

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran	Indikator	Target
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	49 Paket ✓
Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket ✓ 12
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket ✓ 12
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan ✓	3 Dokumen
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	50 Laporan
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 unit
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit
Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit

Kegiatan	Anggaran	Keterangan

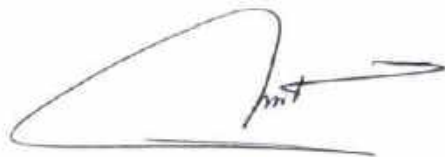
Muaro Sijunjung, - Januari 2024

PIHAK KEDUA
Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari



DELFI SUNAIRI, SE
NIP. 19730902 200312 2 003

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian



AGUSTAR, SH
NIP. 19740812 200003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELVIANITA, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DELFI SUNAIRI, SE
Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari

DELFI SUNAIRI, SE
NIP. 19730902 200312 2 003

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan

ELVIANITA, SE
NIP. 19830203 201001 2 021

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran	Indikator	Target
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2400
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Dokumen
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 Orang

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Jumlah		

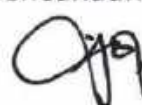
Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari



DELFI SUNAIRI, SE
NIP. 19730902 200312 2 003

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub
Bagian Perencanaan dan Keuangan



ELVIANITA, SE
NIP. 19830203 201001 2 021



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEWINTA INDRI ASTUTI, SSTP,MM
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HENDRA SYAFRIONO PUTRA, S.IP
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Nagari

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemerintahan Nagari

HENDRA SYAFRIONO PUTRA, S.IP
NIP. 19870313 200701 1 001

PIHAK PERTAMA
Analis Kebijakan Ahli Muda

DEWINTA INDRI ASTUTI, SSTP,MM
NIP. 19921128 201406 2 003

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran	Indikator	Target
Terlaksananya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	62 Dokumen
Terselenggaranya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	1 Dokumen
Terlaksananya fasilitasi penetapan dan penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan Batas Desa	30 Desa
Terlaksananya fasilitasi pembinaan laporan Kepala Desa	Jumlah laporan hasil fasilitasi pembinaan laporan Kepala Desa	124 Laporan
Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan produk hukum Desa	5 Dokumen

Program

Anggaran

Keterangan

Jumlah

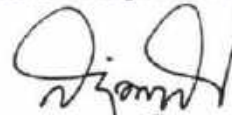
Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemerintahan Nagari



HENDRA SYAFRIONO PUTRA, S.IP
NIP. 19870313 200701 1 001

PIHAK PERTAMA
Analisis Kebijakan Ahli Muda



DEWINTA INDRI ASTUTI, SSTP,MM
NIP. 19921128 201406 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN, SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TAUFIK FADHILLAH, S. Kom

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HENDRA SYAFRIONO PUTRA, S.IP

Jabatan : Kabid Pemerintahan Nagari

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemerintahan Nagari

HENDRA SYAFRIONO PUTRA, S.IP
NIP. 19870313 200701 1 001

PIHAK PERTAMA
Analis Kebijakan Ahli Muda

TAUFIK FADHILLAH, S.Kom
NIP. 19860423 201001 1 015

PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Program
Terlaksananya fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan nagari/desa serta lomba nagari/desa dan kelurahan yang terfasilitasi	1 Dokumen
Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerjasama antar desa dalam Kaupaten/Kota	1 Dokumen
Terlaksananya fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah dokumen hasil profil desa yang terfasilitasi	1 Dokumen

Program

Anggaran

Keterangan

Jumlah

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemerintahan Nagari



HENDRA SYAFRIONO PUTRA, S.IP
NIP. 19870313 200701 1 001

PIHAK PERTAMA
Analisis Kebijakan Ahli Muda



TAUFIK FADHILLAH, S.Kom
NIP. 19860423 201001 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id>

Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEVI KURNIAWATI, SE
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MAGHDALENA, S.TP
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

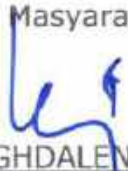
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat


MAGHDALENA, S.TP

NIP. 19740824 200804 2 001

PIHAK PERTAMA
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Muda



DEVI KURNIAWATI, SE

NIP. 198412222 201001 2 022

PERJANJIAN KINERJA
PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran	Indikator	Target
Terlaksananya fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tim penggerak PKK	1 Dokumen
	Jumlah penilaian yang difasilitasi dalam kegiatan Tim Penggerak PKK	5 Kali
	Jumlah fasilitasi jambore PKK yang dilaksanakan	1 Kali
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan pembinaan TP PKK	8 Kec dan 16 Nagari
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Bimtek Penggerak TP PKK	7 kali
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga kemasyarakatan (Posyandu)	Jumlah Posyandu yang dibina	8 Kec dan 16 Nagari
Meningkatnya kapasitas kelembagaan LKD (PKK Jorong)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	304 Lembaga

Kegiatan

Anggaran

Keterangan

Jumlah

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

PIHAK PERTAMA
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Muda


MAGHDALENA, S.TP
NIP. 19740824 200804 2 001


DEVI KURNIAWATI, SE
NIP. 198412222 201001 2 022



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id>

Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAMADIAL, SP
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MAGHDALENA, S.TP
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat


MAGHDALENA, S.TP

NIP. 19740824 200804 2 001

PIHAK PERTAMA
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Muda


RAMADIAL, SP

NIP. 19810703 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran	Indikator	Target
Terlaksananya penataan ,pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan LKD dan LAD	Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD	1 Dok
	Jumlah LPM yang dibina	10 LPM
	Jumlah KAN yang dibina	10 KAN
Meningkatnya kapasitas kelembagaan LKA dan LAD	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang ditingkatkan kapasitasnya	0 lembaga

Kegiatan

Anggaran

Keterangan

Jumlah

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat


MAGHDALENA, S.TP

NIP. 19740824 200804 2 001

PIHAK PERTAMA
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Muda


RAMADIAL, SP

NIP. 19810703 201001 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id>

Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUSI AFRIDA PUTRI, S.Pd
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MAGHDALENA, S.TP
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

MAGHDALENA, S.TP
NIP. 19740824 200804 2 001

PIHAK PERTAMA
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Pertama

SUSI AFRIDA PUTRI, S.Pd
NIPPPK. 19950410 202321 2 042

PERJANJIAN KINERJA
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Target
Terlaksananya Pembinaan Dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	1 dokumen
	Jumlah BUMNag/BUMDes yang dibina	12 BUMNag
	Jumlah BUMdesma yang di bina	5 BUMDDesma

Kegiatan

Anggaran

Keterangan

Jumlah

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat



MAGHDALENA, S.TP
NIP. 19740824 200804 2 001

Muaro Sijunjung, Januari 2024
PIHAK PERTAMA
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Pertama



SUSI AFRIDA PUTRI, S.Pd
NIPPPK. 19950410 202321 2 042



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
AHLI PERTAMA-PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Herzinda Meizora, S.Pd

Jabatan : Ahli Pertama-Penggerak Swadaya Masyarakat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : Agustar, SH

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Agustar, SH

NIP. 19740812 200003 1 005

PIHAK PERTAMA

Ahli Pertama-Penggerak Swadaya
Masyarakat

Herzinda Meizora, S.Pd

NIPPPK. 19930502 202321 2 063

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

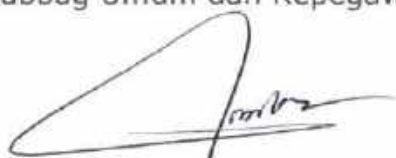
AHLI PERTAMA-PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Target
Terlaksananya pengelolaan data Bezetting dan DUK	Jumlah dokumen bezetting dan DUK yang disusun	24 Dokumen
Terlaksananya usulan administrasi kepegawaian yang diproses tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang di usulkan tepat waktu	15 Dokumen
Tersedianya dokumen absensi dengan baik	Jumlah dokumen absensi yang dikelola	24 Dokumen
Tersedianya dokumen Sk berkala	Jumlah dokumen SK berkala yang dibuat	6 Dokumen

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian



Agustar, SH

NIP. 19740812 200003 1 005

PIHAK PERTAMA

Ahli Pertama-Penggerak Swadaya Masyarakat



Herzinda Meizora, S.Pd

NIPPPK. 19930502 202321 2 063



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI**

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Siska Pratama Putri, S.Sos

Jabatan : Analis Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : Feby Hendra Mukhlis, S.Kom, M.I.Kom

Jabatan : Kepala Bidang Keuangan dan Pembangunan
Nagari

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Keuangan dan
Pembangunan Nagari


Feby Hendra Mukhlis, S.Kom, M.I.Kom
NIP. 19840903 201001 1 019

PIHAK PERTAMA
Analis Pemberdayaan Masyarakat

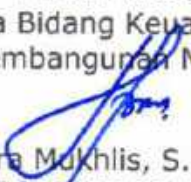

Siska Pratama Putri, S.Sos
NIP. 19970106 202203 2 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

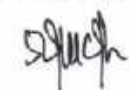
Sasaran	Indikator Kegiatan Individu	Target
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan keuangan Desa	4 Dokumen
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dokumen Penyaluran Dana Desa	Jumlah Dokumen Penyaluran Dana Desa	25 Dokumen
Terselenggaranya Fasilitasi Update Aplikasi Pengelolaan Keuangan Nagari	Jumlah Nagari yang Terfasilitasi dalam Proses Update Data pada Aplikasi	61 Nagari 1 Desa

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Keuangan dan
Pembangunan Nagari


Feby Hendra Mukhlis, S.Kom, M.I.Kom
NIP. 19840903 201001 1 019

PIHAK PERTAMA
Analisis Pemberdayaan Masyarakat


Siska Pratama Putri, S.Sos
NIP. 19970106 202203 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENYUSUN RENCANA KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Sil Oftalina, ST

Jabatan : Penyusun Rencana Keuangan dan barang Milik Negara

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : Elvianita, SE

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Elvianita, SE

NIP. 19830203 201001 2 021

PIHAK PERTAMA

Penyusun Rencana Keuangan dan barang Milik Negara

Sil Oftalina, ST

NIP. 19840507 201001 2 035

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PENYUSUN RENCANA KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Target
Tersedianya dokumen rencana kebutuhan anggaran barang milik daerah	Jumlah dokumen rencana kebutuhan anggaran barang milik daerah	6 dokumen
Terlaksananya penataan aset OPD	Jumlah aset OPD yang akan di usulkan dalam RKBMD pengadaan dan pemeliharaan	23 unit

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan



Elvianita, SE

NIP. 19830203 201001 2 021

PIHAK PERTAMA

Penyusun Rencana Keuangan dan
barang Milik Negara



Sil Oftalina, ST

NIP. 19840507 201001 2 035



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Oktavesina, S.AP

Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : Feby Hendra Mukhlis, S.Kom, M.I.Kom

Jabatan : Kabid Keuangan dan Pembangunan Nagari

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kabid Keuangan dan Pembangunan
Nagari

Feby Hendra Mukhlis, S.Kom, M.I.Kom
NIP.19840903 201001 1 019

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Penyusun Laporan Keuangan

Oktavesina, S.AP
NIP. 19731013 200701 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN**

Sasaran	Indikator Kegiatan Individu	Target
Terlaksananya fasilitasi administrasi penyaluran dana Nagari	Jumlah dokumen penyaluran dana Nagari	25 Dokumen
Terselenggaranya fasilitasi administrasi Nagari	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam administrasi	61 Nagari 1 Desa

PIHAK KEDUA
Kabid Keuangan dan Pembangunan
Nagari



Feby Hendra Mukhlis, S.Kom.M.I.Kom
NIP.19840903 201001 1 019

Muaro Sijunjung, Januari 2024
PIHAK PERTAMA
Penyusun Laporan Keuangan



Oktavesina, S.AP
NIP. 19731013 200701 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PENGELOLA DATA PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Syamsir, A.Md
Jabatan : Pengelola Data Pembangunan Sistem Informasi
Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : Feby Hendra Mukhlis, S.Kom.M.I.Kom
Jabatan : Kabid Keuangan dan Pembangunan Nagari

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kabid Keuangan dan Pembangunan
Nagari

Feby Hendra Mukhlis, S.Kom.M.I.Kom
NIP. 19840903 201001 1 019

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Pengelola Data Pembangunan Sistem
Informasi Keuangan

Syamsir, A.Md
NIP. 19790212 201001 1 020

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PENGELOLA DATA PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI

Sasaran	Indikator Kegiatan Individu	Target
Terlaksananya fasilitasi pembuatan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Desa	62 Dokumen
Terlaksananya fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dokumen perencanaan Pembangunan	61 Nagari 1 Desa
Terlaksananya fasilitasi entry/update data perencanaan Pembangunan desa pada aplikasi	Jumlah Desa yang terfasilitasi entry/update data perencanaan Pembangunan desa pada aplikasi	61 Nagari 1 Desa

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Kabid Keuangan dan Pembangunan
Nagari

Feby Hendra Mukhlis, S.Kom.M.I.Kom
NIP. 19840903 201001 1 019

PIHAK PERTAMA

Pengelola Data Pembangunan Sistem
Informasi Keuangan

Syamsir, A.Md
NIP. 19790212 201001 1 020



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PENGADMINISTRASIAN UMUM

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Syamsu Anwar

Jabatan : Pengadministrasian Umum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : Agustar, SH

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Agustar, SH

NIP. 19740812 200003 1 005

PIHAK PERTAMA

Pengadministrasian Pemerintahan

Syamsu anwar

NIP. 19720708 200901 1 004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PENGADMINISTRASIAN UMUM

Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Target
Terlaksananya administrasi terhadap pelayanan tamu	Jumlah tamu yang tercatat	500 Orang
Terlaksananya administrasi surat masuk	Jumlah surat masuk yang di agendakan	200 surat
Terlaksananya pendistribusian surat keluar	Jumlah surat keluar yang didistribusikan	50 surat

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kasubbag Umum dan Kepegawaian



Agustar, SH
NIP. 19740812 200003 1 005

PIHAK PERTAMA
Pengadministrasian Umum



Syamsu anwar
NIP. 19720708 200901 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Wasgina Chairul, A.Md
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : Elvianita, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kasubag Perencanaan dan
Keuangan

Elvianita, SE

NIP. 19830203 201001 2 021

PIHAK PERTAMA
Bendahara Pengeluaran

Wasgina Chairul, A.Md

NIP. 19740909 200604 2 021

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**BENDAHARA PENGELUARAN**

Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Target
Meningkatnya kualitas layanan penatausahaan keuangan	Jumlah dokumen Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan	60 dokumen
	Jumlah kwitansi yang dibayarkan	2800 kwitansi 2400
	Jumlah berkas pemungutan dan penyetoran pajak yang diterima kas negara dan daerah	200 berkas
	Jumlah SP2D yang diterima dan dicatat berdasarkan tanda bukti	60 SP2D
	Jumlah pembukuan penatausahaan keuangan	4 buku 24
Meningkatnya kualitas laporan pertanggungjawaban bendahara	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan kepada PA melalui PPK	24 laporan

PIHAK KEDUA
Kasubag Perencanaan dan
Keuangan



Elvianita, SE
NIP. 19830203 201001 2 021

Muaro Sijunjung, Januari 2024
PIHAK PERTAMA
Bendahara Pengeluaran Pembantu



Wasgina Chairul, A.Md
NIP. 19740909 200604 2 021



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. FERNANDA, S.STP
Jabatan : Penata Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MAGHDALENA, S.TP
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat


MAGHDALENA, S.TP
NIP. 19740824 200804 2 001

PIHAK PERTAMA
Penata Pemberdayaan Masyarakat


M. FERNANDA, S.STP
NIP. 19980108 201908 1 002

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
Terlaksananya fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tim penggerak PKK	1 Dokumen
	Jumlah penilaian yang difasilitasi dalam kegiatan Tim Penggerak PKK	5 Kali
	Jumlah fasilitasi jambore PKK yang dilaksanakan	1 Kali
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan pembinaan TP PKK	8 Kec dan 16 Nagari
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Bimtek Penggerak TP PKK	4 kali
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga kemasyarakatan (Posyandu)	Jumlah Posyandu yang dibina	8 Kec dan 16 Nagari
Meningkatnya kapasitas kelembagaan LKA dan LAD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga

Kegiatan

Anggaran

Keterangan

Jumlah

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat



MAGHDALENA, S.TP
NIP. 19740824 200804 2 001

PIHAK PERTAMA
Penata Pemberdayaan Masyarakat



M. FERNANDA, S.STP
NIP. 19980108 201908 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

ANALIS PERENCANAAN STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Amille Cantika Buswir, S.TR.IP

Jabatan : Analis Perencanaan Strategis

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : Feby Hendra Mukhlis, S.Kom.M.I.Kom

Jabatan : Kabid Keuangan dan Pembangunan Nagari

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kabid Keuangan dan Pembangunan

Nagari

Feby Hendra Mukhlis, S.Kom.M.I.Kom
NIP. 19840903 201001 1 019

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Analis Perencanaan Strategis

Amille Cantika Buswir, S.TR.IP
NIP. 20001025 202208 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

ANALIS PERENCANAAN STRATEGIS

Sasaran strategis Staf	Indikator Kinerja Individu	Target IKI
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah dokumen pengelolaan aset desa	64 Dokumen
Terselenggaranya fasilitasi sinkronisasi laporan keuangan dengan aset nagari	Jumlah dokumen laporan aset nagari yang sinkron dengan laporan keuangan nagari	62 Dokumen
Terselenggaranya fasilitasi update aplikasi pengelolaan aset nagari	Jumlah nagari yang terfasilitasi proses update data aset	61 Nagari 1 Desa

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Kabid Keuangan dan Pembangunan
Nagari

Feby Hendra Mukhlis, S.Kom.M.I.Kom
NIP. 19840903 201001 1 019

PIHAK PERTAMA

Analisis Perencanaan Strategis

Amille Cantika Buswir, S.TR.IP
NIP. 20001025 202208 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erijon Iswandi
Jabatan : Pengadministrasi Sarana Prasarana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MAGHDALENA, S.TP
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

MAGHDALENA, S.TP
NIP. 19740824 200804 2 001

PIHAK PERTAMA
Pengadministrasi Sarana Prasarana

ERIJON ISWANDI
NIP 19670525 198601 1 001

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
Terlaksananya Administrasi fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi yang di diarsipkan	4 Dokumen
	Jumlah Administrasi fasilitasi kegiatan Tim Penggerak PKK	8 Dokumen
	Jumlah Administrasi fasilitasi jambore PKK yang dilaksanakan	2 Dokumen
	Jumlah Administrasi fasilitasi pelaksanaan pembinaan TP PKK	6 Dokumen
	Jumlah Administrasi fasilitasi pelaksanaan Bimtek Penggerak TP PKK	8 Dokumen

Kegiatan

Anggaran

Keterangan

Jumlah

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat



MAGHDALENA, S.TP
NIP. 19740824 200804 2 001

PIHAK PERTAMA
Pengadministrasi Sarana Prasarana



ERJON ISWANDI
NIP 19670525 198601 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PENGADMINISTRASIAN UMUM

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Sri Sartini Wahyuningsih

Jabatan : Pengadministrasian Umum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : Agustar, SH

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Agustar, SH

NIP. 19740812 200003 1 005

PIHAK PERTAMA

Pengadministrasian Umum

Sri Sartini Wahyuningsih

NIP. 19740810 201001 2 006

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADMINISTRASIAN UMUM

Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Target
Terlaksananya administrasi surat menyurat	Jumlah surat keluar yang diagendakan	1000 Dokumen
	Jumlah surat yang disitribusikan	800 Dokumen
Terlaksananya pengarsipan surat dengan baik	Jumlah dokumen surat yang diarsipkan	1800 Dokumen

Muaro Sijunjung, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Kasubag Umum dan Kepegawaian



Agustar, SH

NIP. 19740812 200003 1 005

PIHAK PERTAMA

Pengadministrasian Umum



Sri Sartini Wahyuningsih
NIP. 19740810 201001 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JONI ANTONIUS, S.Hut.T

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BENNY DWIFA YUSWIR

Jabatan : Bupati Sijunjung

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, 27 November 2024

PIHAK KEDUA
Bupati Sijunjung

BENNY DWIFA YUSWIR

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

JONI ANTONIUS, S.Hut.T
NIP. 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA ESELON II
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran Strategis SKPD	Indikator Kinerja Utama SKPD	Target SKPD
Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja organisasi	78,50
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa Mandiri	40%
Meningkatnya kualitas lembaga adat	Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif	6%

Program	Anggaran	Keterangan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 3.552.518.850,-	
Kerjasama Desa	Rp. 7.987.000,-	
Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 2.029.094.770,-	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.861.303.300,-	
Jumlah	Rp. 7.450.903.920,-	

Muaro Sijunjung, 27 November 2024

PIHAK KEDUA
Bupati Sijunjung



BENNY DWIFA YUSWIR

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari



S.Hut.T
NIP. 1995051199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DELFI SUNAIRI, SE

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : JONI ANTONIUS, S.Hut.T

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, 27 November 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari


JONI ANTONIUS, S.Hut.T
NIP. 19780507 199803 1 004

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari


DELFI SUNAIRI, SE
NIP. 19730902 200312 2 003

PERJANJIAN KINERJA ESELON III
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan
Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan nagari	Nilai indeks pelayanan publik perangkat daerah	94
	Nilai indeks profesional ASN perangkat daerah	75
	Nilai indeks kepatuhan arsip	45
	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP perangkat daerah	100%
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang diselesaikan tepat waktu	95%
2. Meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Kinerja	Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah yang disampaikan tepat waktu	100%
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan	Persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel	100%
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan BMD pada perangkat daerah	Persentase BMD pada OPD yang terpenuhi	85%
	Persentase aset OPD dalam kondisi baik	85%
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu	95%
6. Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi	Persentase tingkat kepuasan layanan organisasi	95%
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana OPD	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	90%

Program	Anggaran	Keterangan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp3.552.518.850,-	
1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 40.582.000,-	
2. Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp. 2.690.971.612,-	
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp. 24.000.000,-	
4. Administrasi umum perangkat	Rp. 246.122.000,-	

daerah		
5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Rp.	154.480.460,-
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp.	235.529.728,-
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp.	160.833.050,-
Jumlah	Rp3.552.518.850,-	

Muaro Sijunjung, 27 November 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari


JONI ANTONIUS, S.Hut.T
NIP. 19780507 199803 1 004

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari


DELFI SUNAIRI, SE
NIP. 19730902 200312 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id>

email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAGHDALENA, S.TP
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Masyarakat
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : JONI ANTONIUS, S.Hut.T
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, November 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari


JONI ANTONIUS, S.Hut.T
NIP. 19780507 199803 1 004

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat


MAGHDALENA, S.TP
NIP. 19740824 200804 2 001

PERJANJIAN KINERJA ESELON III
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan
Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Desa	Persentase BUMNAG/BUMDESMA yang berkontribusi terhadap PAN	59%
1. Meningkatkan pembinaan BUMNAG/BUMDESMA	Persentase BUMNAG/BUMDESMA yang dibina	59%
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	65%
	Persentase usaha ekonomi masyarakat yang aktif	50%
1. Meningkatkan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina	65%
	Persentase usaha ekonomi masyarakat yang dibina	50%
Meningkatnya Pemberdayaan lembaga adat	Persentase lembaga adat yang aktif	84%
1. Meningkatkan pembinaan lembaga adat	Jumlah lembaga adat yang dibina	49 KAN

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 63.460.000,-	
1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp. 63.460.000,-	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.754.236.450	
1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat	Rp. 1.754.236.450	

pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota		
Jumlah	Rp. 1.817.696.450	

Muaro Sijunjung, November 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari



JONI ANTONIUS, S.Hut.T
NIP. 19780507 199803 1 004

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat



MAGHDALENA, S.TP
NIP. 19740824 200804 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. Yamin, SH No. 11 Telp. (0754) 20083

MUARO SIJUNJUNG - 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id>

email:dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN NAGARI DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENDRA SYAFRIONO PUTRA, S.IP

Jabatan : Kabid Pemerintahan Nagari

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : JONI ANTONIUS, S.Hut.T

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, November 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari


JONI ANTONIUS, S.Hut.T
NIP. 19780507 199803 1 004

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Pemerintahan Nagari


HENDRA SYAFRIONO PUTRA, S.IP
NIP. 19870313 200701 1 001

PERJANJIAN KINERJA ESELON III
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN NAGARI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Program
Meningkatnya kerjasama Desa	Persentase peningkatan kerjasama desa	5%
1. Meningkatkan fasilitasi kerjasama desa	Persentase kerjasama desa yang difasilitasi	10%
Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Desa	Persentase administrasi pemerintahan nagari yang berkinerja baik	45%
1. Meningkatkan pembinaan administrasi pemerintahan desa/nagari	Persentase aparaturnya pemerintahan desa/nagari yang memiliki kompetensi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan nagari	15%
	Persentase nagari yang memiliki nilai evaluasi pemerintahan nagari dengan skor 90	100%
	Persentase nagari yang menyampaikan laporan tepat waktu	25%
	Persentase nagari yang memiliki nilai evaluasi perkembangan nagari dengan kategori berkembang	50%
	Persentase nagari yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	35%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 7.987.000,-	
1. Fasilitasi kerjasama antar desa	Rp. 7.987.000,-	
Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 612.107.250,-	

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp. 612.107.250,-	
Jumlah	Rp. 620.094.250,-	

Muaro Sijunjung, November 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari


JONI ANTONIUS, S.Hut.T
NIP. 19780507 199803 1 004

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang
Pemerintahan Nagari


HENDRA SYAFRIONO PUTRA, S.IP
NIP. 19870313 200701 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id>

Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III
KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FEBY HENDRA MUKHLIS, S.Kom,M.I.Kom

Jabatan : Kabid Keuangan dan Pembangunan Nagari

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : JONI ANTONIUS, S.Hut.T

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, November 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari


JONI ANTONIUS, S.Hut.T
NIP. 19780507 199803 1 004

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Keuangan dan
Pembangunan Nagari


FEBY HENDRA MUKHLIS, S.Kom.M.I.Kom
NIP. 19840903 201001 1 019

PERJANJIAN KINERJA ESELON III
KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NAGARI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

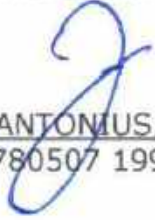
Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan
Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Desa	Indeks transparansi dana desa	82%
1. Meningkatnya pembinaan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset desa/nagari	Persentase penyusunan dokumen perencanaan nagari sesuai aturan	73%
	Persentase nagari yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	90%
	Persentase nagari yang menyampaikan laporan aset tepat waktu	90%
a. Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Jumlah laporan penyelenggaraan musyawarah desa	1 Laporan
b. Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 1.353.527.520,-	
Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Rp. 1.353.527.520,-	
Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Rp. 107.066.850,-	
Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat pelakunya hukum adat	Rp. 107.066.850,-	

yang sama dalam daerah kabupaten/kota		
Jumlah	Rp. 1.460.594.370,00	

Muaro Sijunjung, November 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari


JONI ANTONIUS, S.Hut.T
NIP. 19780507 199803 1 004

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Keuangan dan
Pembangunan Nagari


FEBY HENDRA MUKHLIS, S.Kom.M.I.Kom
NIP. 19840903 201001 1 019



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELVIANITA, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DELFI SUNAIRI, SE
Jabatan : Sekretaris
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, November 2024

PIHAK KEDUA
Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari

DELFI SUNAIRI, SE
NIP. 19730902 200312 2 003

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan

ELVIANITA, SE
NIP. 19830203 201001 2 021

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran	Indikator	Target
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen
Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2400
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Dokumen
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 Orang

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Jumlah		

Muaro Sijunjung, November 2024

PIHAK KEDUA
Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari



DELFI SUNAIRI, SE
NIP. 19730902 200312 2 003

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub
Bagian Perencanaan dan Keuangan



ELVIANITA, SE
NIP. 19830203 201001 2 021



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUSTAR, SH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DELFI SUNAIRI, SE
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, November 2024

PIHAK KEDUA
Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari


DELFI SUNAIRI, SE
NIP. 19730902 200312 2 003

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian


AGUSTAR, SH
NIP. 19740812 200003 1 005

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran	Indikator	Target
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	49 Paket
Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	50 Laporan
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 unit
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit
Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit

Kegiatan	Anggaran	Keterangan

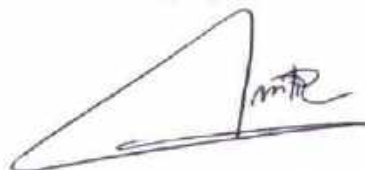
Muaro Sijunjung, November 2024

PIHAK KEDUA
Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari



DELFI SUNAIRI, SE
NIP. 19730902 200312 2 003

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian



AGUSTAR, SH
NIP. 19740812 200003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 11 Telp. (0754) 20083
Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id>

email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEVI KURNIAWATI, SE
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MAGHDALENA, S.TP
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, November 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat


MAGHDALENA, S.TP
NIP. 19740824 200804 2 001

PIHAK PERTAMA
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Muda


DEVI KURNIAWATI, SE
NIP. 198412222 201001 2 022

PERJANJIAN KINERJA
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
Terlaksananya fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tim penggerak PKK	1 Dokumen
	Jumlah penilaian yang difasilitasi dalam kegiatan Tim Penggerak PKK	7 Kali
	Jumlah fasilitasi jambore PKK yang dilaksanakan	1 Kali
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan pembinaan TP PKK	8 Kec dan 16 Nagari
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Bimtek Penggerak TP PKK	6 kali
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga kemasyarakatan (Posyandu)	Jumlah Posyandu yang dibina	8 Kec dan 16 Nagari
Meningkatnya kapasitas kelembagaan LKD (PKK Jorong)	Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	304 Lembaga

Kegiatan

Anggaran

Keterangan

Jumlah

Muaro Sijunjung, November 2024

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat



MAGHDALENA, S.TP

NIP. 19740824 200804 2 001

PIHAK PERTAMA

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda



DEVI KURNIAWATI, SE

NIP. 198412222 201001 2 022



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAMADIAL, SP
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

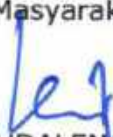
Nama : MAGHDALENA, S.TP
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, November 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat


MAGHDALENA, S.TP

NIP. 19740824 200804 2 001

PIHAK PERTAMA
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Muda


RAMADIAL, SP

NIP. 19810703 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
Terlaksananya penataan ,pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan LKD dan LAD	Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD	1 Dok
	Jumlah KAN yang dibina	10 KAN
	Jumlah LPM yang dibina	10 LPM
Meningkatnya kapasitas kelembagaan LKA dan LAD	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang ditingkatkan kapasitasnya	0 lembaga

Kegiatan

Anggaran

Keterangan

Jumlah

Muaro Sijunjung, November 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat


MAGHDALENA, S.TP
NIP. 19740824 200804 2 001

PIHAK PERTAMA
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Muda


RAMADIAL, SP
NIP. 19810703 201001 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN, SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id>

Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI MUDA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YULIA ASTUTI, A.Md
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli
Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HENDRA SYAFRIONO PUTRA, S.IP
Jabatan : Kabid Pemerintahan Nagari

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, November 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemerintahan Nagari

HENDRA SYAFRIONO PUTRA, S.IP
NIP. 19870313 200701 1 001

PIHAK PERTAMA
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Ahli Muda

YULIA ASTUTI, A. Md
NIP. 19780709 200212 2 004

PERJANJIAN KINERJA ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah nagari	Jumlah aparatur pemerintah nagari yang mengikuti peningkatan kapasitas	143 orang
Terlaksananya peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Nagari	Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang mengikuti peningkatan kapasitas	30 orang
Terlaksananya monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah nagari	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah nagari	2 dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
---------	----------	------------

Jumlah

Muaro Sijunjung, November 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemerintahan Nagari



HENDRA SYAFRIONO PUTRA, S.IP
NIP. 19870313 200701 1 001

PIHAK PERTAMA
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
Ahli Muda



YULIA ASTUTI, A. Md
NIP. 19780709 200212 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Wasgina Chairul, A.Md
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
N a m a : Elvianita, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, 27 November 2024

PIHAK KEDUA
Kasubag Perencanaan dan
Keuangan

Elvianita, SE
NIP. 19830203 201001 2 021

PIHAK PERTAMA
Bendahara Pengeluaran

Wasgina Chairul, A.Md
NIP. 19740909 200604 2 021

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BENDAHARA PENGELUARAN

Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Target
Meningkatnya kualitas layanan penatausahaan keuangan	Jumlah dokumen Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan	74 dokumen
	Jumlah kwitansi yang dibayarkan	2630 kwitansi
	Jumlah berkas pemungutan dan penyetoran pajak yang diterima kas negara dan daerah	478 berkas
	Jumlah SP2D yang diterima dan dicatat berdasarkan tanda bukti	74 SP2D
	Jumlah pembukuan penatausahaan keuangan	24 buku
Meningkatnya kualitas laporan pertanggungjawaban bendahara	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan kepada PA melalui PPK	24 laporan

PIHAK KEDUA
Kasubag Perencanaan dan
Keuangan



Elvianita, SE
NIP. 19830203 201001 2 021

Muaro Sijunjung, 27 November 2024
PIHAK PERTAMA
Bendahara Pengeluaran Pembantu



Wasgina Chairul, A.Md
NIP. 19740909 200604 2 021



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 11 Telp. (0754) 20083
Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id>

email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. FERNANDA, S.STP, M.A.P
Jabatan : Penata Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MAGHDALENA, S.TP
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, November 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat


MAGHDALENA, S.TP
NIP. 19740824 200804 2 001

PIHAK PERTAMA
Penata Pemberdayaan Masyarakat


M. FERNANDA, S.STP, M.A.P
NIP. 19980108 201908 1 002

PERJANJIAN KINERJA
PENATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
Terlaksananya fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Administrasi Fasilitasi dalam kegiatan Tim Penggerak PKK	7 Dokumen
	Jumlah Administrasi fasilitasi jambore PKK yang dilaksanakan	1 Dokumen
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan pembinaan TP PKK	8 Kec dan 16 Nagari
	Jumlah Administrasi fasilitasi pelaksanaan Bimtek Penggerak TP PKK	6 Dokumen
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga kemasyarakatan (Posyandu)	Jumlah Posyandu yang dibina	8 Kec dan 16 Nagari
Meningkatnya kapasitas kelembagaan LKD (PKK Jorong)	Jumlah Administrasi Fasilitasi Peningkatan Lembaga kemasyarakatan desa.	1 Dokumen

Kegiatan

Anggaran

Keterangan

Jumlah

Muaro Sijunjung, November 2024

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat



MAGHDALENA, S.TP
NIP. 19740824 200804 2 001

PIHAK PERTAMA

Penata Pemberdayaan Masyarakat



M. FERNANDA, S.STP, M.A.P
NIP. 19980108 201908 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENYUSUN RENCANA KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Sil Oftalina, ST

Jabatan : Penyusun Rencana Keuangan dan barang Milik Negara

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : Elvianita, SE

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, 27 November 2024

PIHAK KEDUA

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Elvianita, SE

NIP. 19830203 201001 2 021

PIHAK PERTAMA

Penyusun Rencana Keuangan dan barang Milik Negara

Sil Oftalina, ST

NIP. 19840507 201001 2 035

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PENYUSUN RENCANA KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Target
Tersedianya dokumen rencana kebutuhan anggaran barang milik daerah	Jumlah dokumen rencana kebutuhan anggaran barang milik daerah	6 dokumen
Terlaksananya penataan aset OPD	Jumlah aset OPD yang akan di usulkan dalam RKBMD pengadaan dan pemeliharaan	23 unit

Muaro Sijunjung, 27 November 2024

PIHAK KEDUA

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan



Elvianita, SE

NIP. 19830203 201001 2 021

PIHAK PERTAMA

Penyusun Rencana Keuangan dan barang Milik Negara



Sil Oftalina, ST

NIP. 19840507 201001 2 035



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
NAGARI**

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Siska Pratama Putri, S.Sos

Jabatan : Analis Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : Feby Hendra Mukhlis, S.Kom, M.I.Kom

Jabatan : Kepala Bidang Keuangan dan Pembangunan
Nagari

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, 27 November 2024

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Keuangan dan
Pembangunan Nagari

Feby Hendra Mukhlis, S.Kom, M.I.Kom
NIP. 19840903 201001 1 019

PIHAK PERTAMA

Analis Pemberdayaan Masyarakat

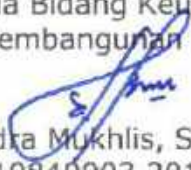
Siska Pratama Putri, S.Sos
NIP. 19970106 202203 2 009

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

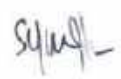
Sasaran	Indikator Kegiatan Individu	Target
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan keuangan Desa	4 Dokumen
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Dokumen Penyaluran Dana Desa	Jumlah Dokumen Penyaluran Dana Desa	25 Dokumen
Terselenggaranya Fasilitas Update Aplikasi Pengelolaan Keuangan Nagari	Jumlah Nagari yang Terfasilitasi dalam Proses Update Data pada Aplikasi	61 Nagari 1 Desa

Muaro Sijunjung, 27 November 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Keuangan dan
Pembangunan Nagari


Feby Hendra Mukhlis, S.Kom, M.I.Kom
NIP. 19840903 201001 1 019

PIHAK PERTAMA
Analisis Pemberdayaan Masyarakat


Siska Pratama Putri, S.Sos
NIP. 19970106 202203 2 009



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
NAGARI**

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083
Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGELOLA DATA PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Syamsir, A.Md
Jabatan : Pengelola Data Pembangunan Sistem Informasi
Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : Feby Hendra Mukhlis, S.Kom.M.I.Kom
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli
Muda

Feby Hendra Mukhlis, S.Kom.M.I.Kom
NIP. 19840903 201001 1 019

Muaro Sijunjung, 27 November 2024
PIHAK PERTAMA

Pengelola Data Pembangunan Sistem
Informasi Keuangan

Syamsir, A.Md
NIP. 19790212 201001 1 020

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGELOLA DATA PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI

Sasaran strategis Staf	Indikator Kinerja Individu	Target IKI
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan sarana dan prasarana Nagari	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana Nagari yang terfasilitasi	61 Nagari 1 Desa
Terlaksananya fasilitasi update aplikasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan Nagari	Jumlah nagari terfasilitasi proses update aplikasi penatausahaan keuangan Nagari	61 Nagari 1 Desa
Terlaksananya pengelolaan data base penatausahaan keuangan Nagari	Jumlah data kompilasi yang dikelola dalam penatausahaan keuangan Nagari	3 Dokumen

PIHAK KEDUA

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Feby Hendra Mukhlis, S.Kom.M.I.Kom
NIP. 19840903 201001 1 019

Muaro Sijunjung, 27 November 2024
PIHAK PERTAMA

Pengelola Data Pembangunan Sistem Informasi Keuangan

Syamsir, A.Md
NIP. 19790212 201001 1 020



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
NAGARI**

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083
Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Oktavesina, S.AP

Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : Feby Hendra Mukhlis, S.Kom, M.I.Kom

Jabatan : Kabid Keuangan dan Pembangunan Nagari

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Kabid Keuangan dan Pembangunan
Nagari

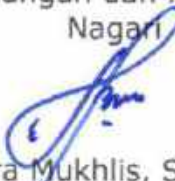

Feby Hendra Mukhlis, S.Kom, M.I.Kom
NIP.19840903 201001 1 019

Muaro Sijunjung, 27 November 2024
PIHAK PERTAMA
Penyusun Laporan Keuangan


Oktavesina, S.AP
NIP. 19731013 200701 1 005

Sasaran	Indikator Kegiatan Individu	Target
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Penyaluran Dana Nagari	Jumlah Dokumen Penyaluran Dana Nagari	25 Dokumen
Terselenggaranya Fasilitasi Administrasi Nagari	Jumlah Nagari Yang Terfasilitasi Dalam Administrasi	61 Nagari 1 Desa

PIHAK KEDUA
Kabid Keuangan dan Pembangunan
Nagari


Feby Hendra Mukhlis, S.Kom.M.I.Kom
NIP.19840903 201001 1 019

Muaro Sijunjung, 27 November 2024

PIHAK PERTAMA
Penyusun Laporan Keuangan


Oktavesina, S.AP
NIP. 19731013 200701 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PENGADMINISTRASIAN UMUM

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Syamsu Anwar

Jabatan : Pengadministrasian Umum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : Agustar, SH

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, 27 November 2024

PIHAK KEDUA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Agustar, SH

NIP. 19740812 200003 1 005

PIHAK PERTAMA

Pengadministrasian Pemerintahan

Syamsu anwar

NIP. 19720708 200901 1 004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADMINISTRASIAN UMUM

Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Target
Terlaksananya administrasi terhadap pelayanan tamu	Jumlah tamu yang tercatat	200 Orang
Terlaksananya administrasi surat masuk	Jumlah surat masuk yang di agendakan	600 surat
Terlaksananya pendistribusian surat keluar	Jumlah surat keluar yang didistribusikan	50 surat

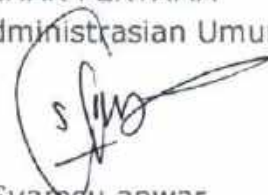
Muaro Sijunjung, 27 November 2024

PIHAK KEDUA
Kasubbag Umum dan Kepegawaian



Agustar, SH
NIP. 19740812 200003 1 005

PIHAK PERTAMA
Pengadministrasian Umum



Syamsu anwar
NIP. 19720708 200901 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PENGADMINISTRASIAN UMUM

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Sri Sartini Wahyuningsih

Jabatan : Pengadministrasian Umum

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : Agustar, SH

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, 27 November 2024

PIHAK KEDUA

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Agustar, SH

NIP. 19740812 200003 1 005

PIHAK PERTAMA

Pengadministrasian Umum

Sri Sartini Wahyuningsih

NIP. 19740810 201001 2 006

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

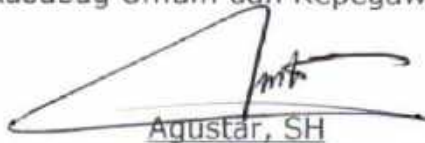
PENGADMINISTRASIAN UMUM

Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Target
Terlaksananya administrasi surat menyurat	Jumlah surat keluar yang diagendakan	500 Dokumen
	Jumlah surat yang disitribusikan	400 Dokumen
Terlaksananya pengarsipan surat dengan baik	Jumlah dokumen surat yang diarsipkan	600 Dokumen

Muaro Sijunjung, 27 November 2024

PIHAK KEDUA

Kasubag Umum dan Kepegawaian



Agustar, SH

NIP. 19740812 200003 1 005

PIHAK PERTAMA

Pengadministrasian Umum



Sri Sartini Wahyuningsih
NIP. 19740810 201001 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Prof. M. YAMIN , SH No. 11 Telp. (0754) 20083

Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id> Email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
AHLI PERTAMA-PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Herzinda Meizora, S.Pd

Jabatan : Ahli Pertama-Penggerak Swadaya Masyarakat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : Agustar, SH

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, 27 November 2024

PIHAK KEDUA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Agustar, SH

NIP. 19740812 200003 1 005

PIHAK PERTAMA

Ahli Pertama-Penggerak Swadaya
Masyarakat

Herzinda Meizora, S.Pd

NIPPPK. 19930502 202321 2 063

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
AHLI PERTAMA-PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Target
Terlaksananya pengelolaan data Bezetting dan DUK	Jumlah dokumen bezetting dan DUK yang disusun	24 Dokumen
Terlaksananya usulan administrasi kepegawaian yang diproses tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang di usulkan tepat waktu	10 Dokumen
Tersedianya dokumen absensi dengan baik	Jumlah dokumen absensi yang dikelola	24 Dokumen
Tersedianya dokumen Sk berkala	Jumlah dokumen SK berkala yang dibuat	6 Dokumen

Muaro Sijunjung, 27 November 2024

PIHAK KEDUA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

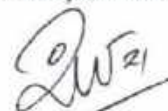


Agustar, SH

NIP. 19740812 200003 1 005

PIHAK PERTAMA

Ahli Pertama-Penggerak Swadaya Masyarakat



Herzinda Meizora, S.Pd

NIPPPK. 19930502 202321 2 063



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 11 Telp. (0754) 20083
Muaro Sijunjung 27511

Website <http://www.dpmn.sijunjung.go.id>

email: dpmn@sijunjung.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUSI AFRIDA PUTRI, S.Pd
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MAGHDALENA, S.TP
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muaro Sijunjung, November 2024

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

MAGHDALENA, S.TP
NIP. 19740824 200804 2 001

PIHAK PERTAMA
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Pertama

SUSI AFRIDA PUTRI, S.Pd
NIPPPK. 19950410 202321 2 042

PERJANJIAN KINERJA
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Target
Terlaksananya Pembinaan Dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	1 dokumen
	Jumlah BUMNag/BUMDes yang dibina	12 Bum nag/ Bumdes
	Jumlah Bumdesma yang dibina	5 Bumdesma

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

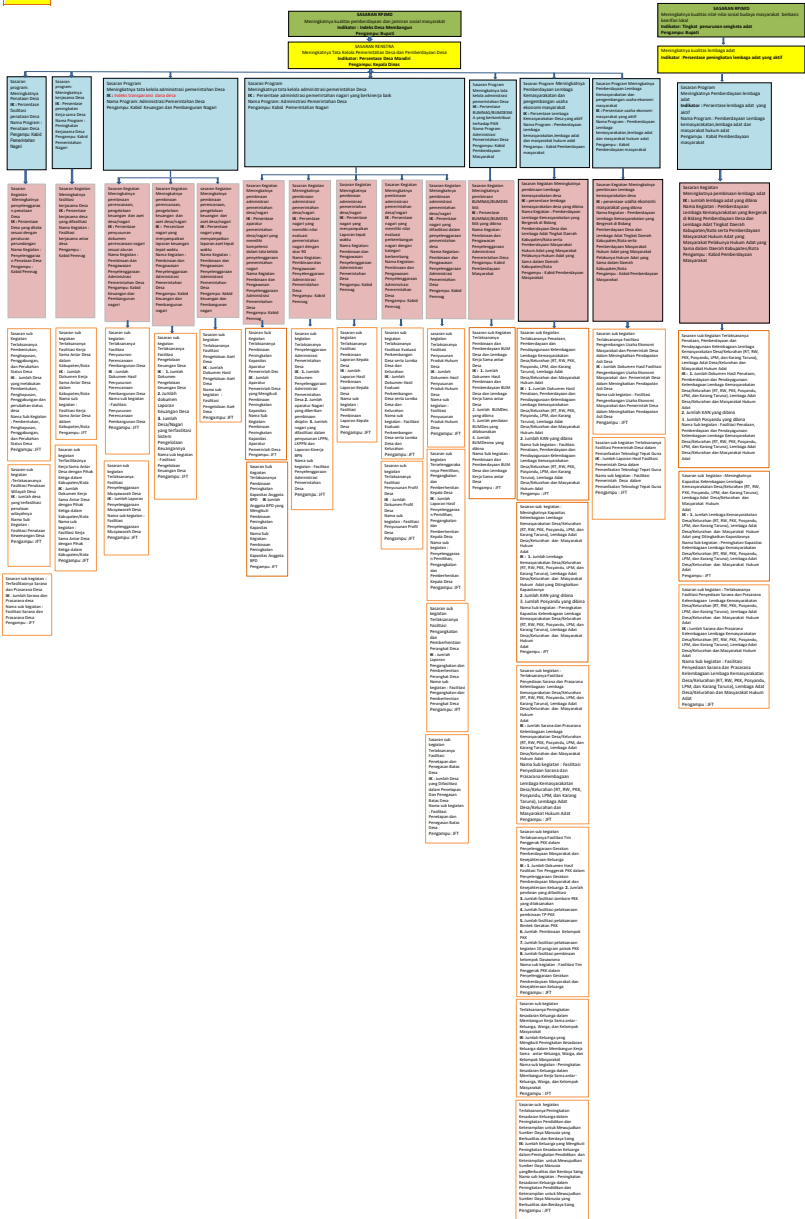


MAGHDALENA, S.TP
NIP. 19740824 200804 2 001

Muaro Sijunjung, November 2024
PIHAK PERTAMA
Penggerak Swadaya Masyarakat
Ahli Pertama

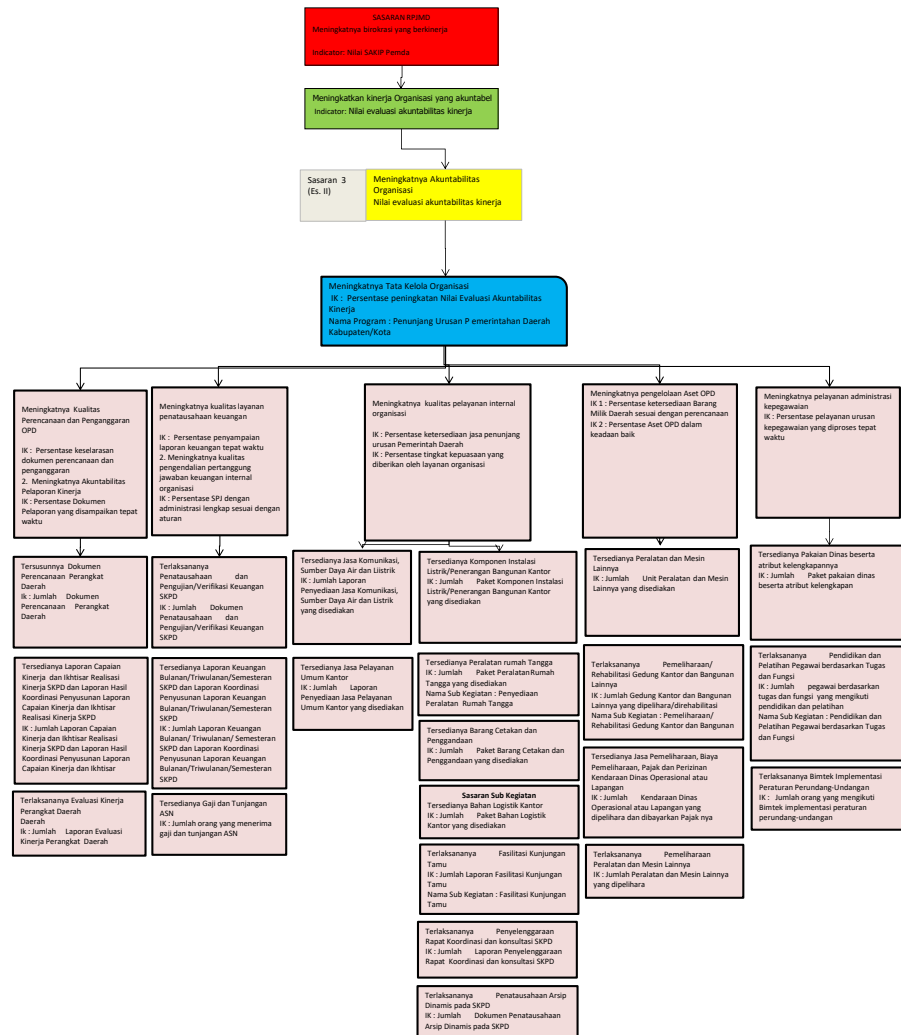


SUSI AFRIDA PUTRI, S.Pd
NIPPPK. 19950410 202321 2 042



[illegible]





Muaro Sijunjung, Januari 2024
Kepala Dimas
Pembina Masyarakat dan Nagari


DIONUS, S.Hut.T
4780507 199803 1 004



INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL EVALUASI (L H E)

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024**

**NOMOR : 08/LHE-AKIP/ITDA-2024
TANGGAL : 10 JUNI 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
INSPEKTORAT DAERAH**

Alamat : Jalan Ir.H .JUANDA No. 03 ☎ (0754) 20953

MUARO SIJUNJUNG 27511

e-mail : inspektorat.kab.sijunjung@gmail.com

Nomor	: 08/LHE-AKIP/ITDA-2024	Muaro Sijunjung, 10 Juni 2024
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Perihal	: Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2024	Kepada Yth.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung

di –

Muaro Sijunjung

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung, dengan uraian sebagai berikut :

I. Pendahuluan

1. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569;
- d. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 65 Tahun 2018 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
- e. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor : 188.45/28/KPTS-ITDA-2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung;

- f. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : 145291407 tanggal 17 April 2024, melakukan Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung ke DPMN, Dukcapil, Kominfo, Nakertrans dan Kecamatan Kamang Baru.

2. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Secara khusus evaluasi SAKIP bertujuan untuk :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian Keberdaaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen :

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Kinerja Internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi AKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

5. Jadwal dan Tim Evaluasi

Evaluasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung dilaksanakan mulai tanggal 17 s/d 23 April 2024 (5 hari kerja), dengan susunan tim sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Wandri Fahrizal, SH | Penanggung Jawab |
| 2. Djoko Ismarttando Utomo, SE.MM | Wakil Penanggung Jawab |
| 3. Lilis Suryati, SST | Ketua Tim |
| 4. Yusmai Yelta, SKM | Anggota |

6. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung menunjukkan bahwa nilai sebesar 78,36 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,00
2.	Pengukuran Kinerja	30	23,10
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	78,36
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung tahun 2024 sebagai berikut :

1) Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan secara menyeluruh khususnya pada tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target pada Perangkat Daerah yang lebih berorientasi hasil/outcome

dan selaras dengan sasaran strategisnya. Perbaikan dokumen ini berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

Hasil Evaluasi terhadap komponen Perencanaan Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung yang telah dilaksanakan, diantaranya sebagai berikut :

- a) Telah terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja yang ditetapkan melalui Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Kinerja SAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
- b) Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah yaitu Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung
- c) Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek yaitu Renja Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.
- d) Telah terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja yaitu Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2023.
- e) Telah terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja yaitu RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dan DPA-Perubahan Tahun 2023.
- f) Dokumen Perencanaan berupa Renstra 2021-2026 dan Renja Tahun 2023 telah diformalkan melalui Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tanggal 23 September 2021 tentang Renstra Perangkat Daerah.
- g) Kualitas Indikator Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- h) Indikator Kinerja telah memenuhi kriteria spesifik, terukur, relevan dan cukup.
- i) Penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) telah disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya.
- j) Setiap pegawai telah merumuskan dan menetapkan Perjanjian Kinerja.
- k) Rencana Aksi telah mencantumkan aktivitas/langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.

- l) Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut :

- a) Dokumen Perencanaan Kinerja berupa Renstra 2021-2026 dan Renja Tahun 2023 telah dipublikasikan pada Website Pemda <https://ppid.sijunjung.go.id/>. Namun belum dipublikasikan tepat waktu (paling lambat 1 bulan setelah dokumen disahkan), dimana Renstra dipublikasikan tgl 24 Juni 2023 dan Renja Tahun 2023 baru dipublikasikan pada Tanggal 24 Mei 2023.
- b) Dokumen perencanaan kinerja berupa Renstra 2021-2026, Renja Tahun 2023 belum ada pengesahan seperti tanggal ,tanda tangan serta stempel OPD

2) Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap komponen Pengukuran Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung yang telah dilaksanakan dengan **sangat baik** diantaranya sebagai berikut :

- a) Telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja yang ditetapkan melalui Pedoman Pelaksanaan Pengukuran Kinerja SAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
- b) Telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- c) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja seperti Arahan pimpinan pada rapat monitoring dan evaluasi kinerja.
- d) Data Kinerja yang dikumpulkan telah sesuai SK IKU Tahun 2023 sebagaimana yang telah dilaporkan di LKJIP Tahun 2023 serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai sumber data dari masing-masing indikator kinerja.
- e) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala tetapi untuk monitoring dan evaluasi belum dilakukan.
- f) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut :

- a) SOP pengukuran kinerja dan SOP Pengumpulan data Kinerja masih perlu perbaikan (belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan).
- b) Setiap Bidang telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja melalui rapat evaluasi kinerja per Bidang namun belum dilakukan secara berkala.
- c) Aplikasi e-SAKIP telah dibangun pada tahun 2024, namun belum untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah.

3) Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung yang telah dilaksanakan dengan **sangat baik** diantaranya sebagai berikut :

- a) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung telah di Reviu oleh APIP.
- b) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 telah dipublikasi pada Website Pemda <https://ppid.sijunjung.go.id/> dan Aplikasi <https://esr.menpan.go.id/>
- c) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar (PermenpanRB Nomor 53/2014).
- d) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
- e) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
- f) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.

- g) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- h) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- i) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
- j) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut :

- a) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung telah disusun dan belum disampaikan tepat waktu (paling lambat tanggal 31 Maret 2024), penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2023 pada tanggal 23 Mei 2023

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi terhadap komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung yang telah dilaksanakan dengan **sangat baik** diantaranya sebagai berikut :

- a) Telah terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Nomor : 188.45/28/KPTS-ITDA-2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- c) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan Sumber Daya yang memadai.

- d) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan dampak dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut :

- a) Evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) karena e-SAKIP sudah dibangun tetapi belum dimanfaatkan

7. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung, agar :

- a) Dokumen Perencanaan Kinerja berupa Renstra 2021-2026, Renja Tahun 2023 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 disarankan untuk dipublikasikan pada Website Pemda <https://ppid.sijunjung.go.id/>, tepat waktu (paling lambat 1 bulan setelah dokumen disahkan).
- b) Dokumen perencanaan kinerja berupa Renstra 2021-2026, Renja Tahun 2023 belum ada pengesahan seperti tanggal, tanda tangan serta stempel OPD
- c) SOP pengukuran kinerja dan SOP Pengumpulan data Kinerja masih perlu perbaikan (belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan).
- d) Setiap Bidang melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berkala.
- e) Melakukan koordinasi dengan Bappeda terkait Aplikasi e-SAKIP untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah.

8. Apresiasi.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung mengapresiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung atas kerjasama yang telah dilakukan, baik dalam pengumpulan data maupun pemberian keterangan, sehingga pelaksanaan evaluasi berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

 **INSPEKTUR
KABUPATEN SIJUNJUNG**

Wandri Fahrizal, SH
NIP. 19710705 199803 1 011

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung Cq.Kepala Bagian Organisasi di Muaro Sijunjung.
2. Arsip.



RENCANA AKSI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja utama	Target Kinerja				RENCANA AKSI PENCAPAIN TARGET INDIKATOR KINERJA					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Pendanaan		Penanggung Jawab			
		TW I	TW II	TW III	TW IV	Langkah-langkah/Aktivitas Pencapaian				TW I			TW II	TW III		TW IV	Target	Rp
(1)	(2)	(3)				(4)				(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(14)
													URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
													DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI			7.885.478.553		
Meningkatnya akuntabilitas organisasi	Nilai evaluasi akuntabilit		78,50										PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	95%	3.690.399.903	Sekretariat	
														Nilai Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	75			
														Nilai Indeks Kepatuhan arsip	45			
														Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP Perangkat Daerah	100%			
															Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ddislesaikan tepat waktu	90%	43.773.000
													Persentase dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah yang disampaikan tepat waktu	100%				
						1. Menyusun Draft Pohon Kinerja dan Cascading 2. Menyusun Rancangan Awal Renja Tahun 2025 3. Melaksanakan Forum Perangkat Daerah Rancangan Awal Renja Tahun 2025 4. Melaksanakan Verifikasi rancangan renja Di Bappeda 5. Menyusun Rancangan Renja Tahun 2025 5. Menyusun Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 6. Menyusun Renja Tahun 2025 7. Menyusun Renja Perubahan Tahun 2024				√ √ √ √		√ √ √ √	√	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	39.292.000	Sekretariat
						1. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 2. Membuat dan menyusun dokumen untuk evaluasi Inspektorat Daerah 3. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 4. Melaksanakan desk LPPD dengan tim Kabupaten dan Provinsi 5. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023				√ √ √ √		√		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dok	4.481.000	Sekretariat
													Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel	100%	2.644.606.943	Sekretariat	
						1. Belanja gaji dan tunjangan ASN 2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN				√ √ √	√ √ √	√ √ √	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	23 Org	2.587.459.943	Sekretariat	

					1. Verifikasi SPJ yang masuk 2. Penginputan dan Verifikasi SPJ pada SIPD 3. Membayarkan SPJ 4. Membuat BKU dan LPJ Fungsional Bulanan 5. Menyusun Laporan pajak Bulanan 6. Menyusun register penutupan kas bulanan	√ √ √ √ √	√ √ √ √ √	√ √ √ √ √	√ √ √ √ √	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2400 Dok	29.300.000	Sekretariat
					1. Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 2. Melaksanakan rekon laporan keuangan akhir tahun dengan Tim BKAD	√ √				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	12.848.000	Sekretariat
					1. Menyusun Laporan Keuangan Bulanan 2. Menyusun Laporan Keuangan Semesteran	√ √	√ √	√ √	√ √	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Lap	14.999.000	Sekretariat
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang terpenuhi tepat waktu	95%	25.000.000	
					1. Survey Harga Pakaian Dinas Pengajuan E-katalog 2. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	√ √ √				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	49 pkt	25.000.000	
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	90%	329.071.450	Sekretariat
					1. Belanja Alat/bahan kegiatan kantor -Alat Listrik	√ √	√ √	√ √	√ √	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pkt	19.172.800	Sekretariat
					1. Pengajuan E-katalog 2. Belanja Alat/bahan kegiatan kantor -Alat Tulis Kantor Belanja Alat/bahan kegiatan kantor -ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, dan untuk kegiatan kantor lainnya	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Pkt	72.478.500	Sekretariat
					1. Pengajuan E-katalog 2. Belanja Alat/bahan kegiatan kantor -Alat Tulis Kantor	√ √	√ √	√ √	√ √	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	2 Pkt	31.451.300	Sekretariat
					1. Belanja langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	√ √	√ √	√ √	√ √	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dok	5.040.000	Sekretariat
					- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	√ √	√ √	√ √	√ √	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Lap	59.974.750	Sekretariat
					1. melaksanakan Rapat Evaluasi Secara Berkala 2. Menyusun Notulen rapat 3. Melaksanakan perjalanan dinas 4. Menyusun Laporan Perjalanan Dinas	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi pada SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	50 Lap	140.954.100	Sekretariat
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD OPD yang terpenuhi	85%	162.480.460	
					1. Survey Harga Mebel Pengajuan E-Katalog 2. Belanja Mebel	√ √				Pengadaan mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	12 Unit	41.756.610	

						1. Survey Harga Peralatan dan mesin 2. Belanja peralatan dan mesin lainnya	√ √				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesinlainnya yang disediakan	11 unit	120.723.850	
											Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan layanan organisasi	95%	291.245.000	Sekretariat
						1. Belanja Tagihan Air, Listrik, dan Telpn 2. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	√ √	√ √	√ √	√ √	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	103.800.000	Sekretariat
						- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan Keamanan	√	√	√	√	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	187.445.000	Sekretariat
											Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset OPD dalam keadaan baik	85%	194.223.050	Sekretariat
						1. Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 2. Belanja Pemeliharaan Kendaraan dinas perorangan 3. Belanja Pemeliharaan Kendaraan beroda 2	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	106.078.350	Sekretariat
						Pemeliharaan AC, Komputer, dan Peralatan Lainnya	√	√	√	√	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 unit	46.360.000	Sekretariat
						Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	√	√	√	√	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	41.784.700	Sekretariat
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa Mandiri			40%							PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan Kerja sama Desa	5%	25.000.000	Bidang Pemnag
											Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase kerjasama desa yang difasilitasi	33%	25.000.000	Bidang Pemnag
						1. Melakukan rekapitulasi data kerjasama nagari 2. Fasilitasi kerjasama nagari	√ √	√ √	√ √	√ √	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar nagari dalam Kabupaten/Kota	1 Dok	25.000.000	Bidang Pemnag
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Desa											PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Indeks transparansi dana desa	82	2.195.634.850	
												Persentase administrasi pemerintahan nagari yang berkinerja baik	45%		
												Persentase BUMNAG/BUMDESMA yang berkontribusi terhadap PAN	59%		
											Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur pemerintahan desa/nagari yang memiliki kompetensi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan nagari	15%		
												Persentase nagari yang memiliki nilai evaluasi pemerintahan nagari dengan skor 90	100%		

											Persentase nagari yang menyampaikan Laporan kinerja tepat waktu	70%	2.195.634.850		
											Persentase nagari yang memiliki nilai evaluasi perkembangan nagari dengan kategori berkembang	80%			
											Persentase nagari yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	45%			
											Persentase dokumen perencanaan nagari yang sesuai aturan	65%			
											Persentase nagari yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	85%			
											Persentase nagari yang menyampaikan laporan aset tepat waktu	90%			
											Persentase BUMNAG/BUMDESM A yang dibina	59%			
					1.	Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa				Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	62 Dok	89.856.600	Bidang Pemnag	
					1.	Melakukan fasilitasi terhadap penyusunan produk hukum desa	√	√	√	√	Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan produk hukum desa	5 Dok	15.000.000	
					1.	survey lokasi berdasarkan proposal usulan penerima BKK dengan OPD teknis	√	√			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Perencanaan Pembangunan Desa yang difasilitasi	15 Dok	102.900.000	Bidang Keu dan Pembangunan Nagari
					2.	Membuat SK penerima BKK yang telah disetujui	√								
					3.	Pembinaan dan pendampingan proses penyusunan RKP nagari		√	√						
					4.	Pendampinga musyawarah penetapan RKP nagari			√						
					5.	Klarifikasi dokumen RKP nagari dengan tim klarifikasi kabupaten				√					
					6.	Melakukan pembinaan dan pendampingan perbaikan RKP nagari hasil klarifikasi tim kabupaten				√					
					1.	Melaksanakan rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun nagari	√				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	186 Dok	1.236.536.900	Bidang Keu dan Pembangunan Nagari
					2.	Proses pencairan alokasi dana nagari dan dana desa	√	√	√	√					
					3.	Melaksanakan rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan semester nagari			√	√					
					4.	Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan nagari	√	√	√	√					
					5.	Penyusunan perbup terkait penataan dan pengelolaan keuangan nagari		√	√	√	√				
					1.	Penyusunan SK penunjukkan narasumber,moderator dan penceramah	√				Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	130 Org	379.643.500	Bidang Pemnag
					2.	Melaksanakan rapat pelaksanaan kegiatan pelatihan		√							
					3.	survey tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan		√							
					4.	Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur		√		√					
					5.	monitoring dan pembinaan serta evaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa			√	√					
					1.	Melakukan fasilitasi/pendampingan penyelenggaraan musyawarah yang dilaksanakan oleh nagari			√		Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	10 Lap	20.000.000	Bidang Keu dan Pembangunan Nagari
					1.	Melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap BumNag	√	√	√	√	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 Dok	82.200.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
					2.	Menghadiri RAT BumNag yang diselenggarakan oleh BumNag	√								
					3.	Menghadiri Musyawarah antar nagari yang diselenggarakan oleh Bumdesma	√								
					4.	Melaksanakan rapat evaluasi BumNag dan Bumdesma				√					

						1. Penyusunan SK PAW Walinagari 2. Pemilihan walinagari antar waktu 3. Pelantikan PAW walinagari	√ √ √				Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Lap	25.000.000	Bidang Pemnag
						1. Melaksanakan rekonsiliasi penyusunan laporan aset akhir tahun 2. Pembinaan dan monitoring sistem pengelolaan aset nagari	√ √ √ √				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	124 Dok	36.998.000	Bidang Keu dan Pembangunan Nagari
						1. Penyusunan SK penunjukkan narasumber, moderator dan penceramah 2. Melaksanakan rapat pelaksanaan kegiatan pelatihan 3. survey tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan 4. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas BPD 5. monitoring dan pembinaan serta evaluasi peningkatan kapasitas BPD	√ √ √ √ √				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	35 Org	122.499.950	Bidang Pemnag
						1. Melakukan klarifikasi data profil nagari ke semua nagari	√ √ √ √				Fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah dokumen hasil profil desa yang terfasilitasi	1 dok	15.000.000	Bidang Pemnag
						1. Melakukan rapat dengan nagari yang berbatasan 2. Penyusunan SK penetapan batas nagari 3. Melaksanakan peninjauan lapangan terkait penetapan titik koordinat batas nagari 4. Inventarisir dokumen administrasi batas nagari	 √ √ √ √ √	√ √ √ √			Fasilitasi Penetapan dan Pengelasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Pengelasan Batas Desa	30 Nagari	45.000.000	Bidang Pemnag
						1. Rekapitulasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap target kinerja walinagari yang sudah ditetapkan 3. Melaksanakan pembinaan penyusunan laporan kepala desa	√ √ √ √ √	√ √ √ √ √			Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	Jumlah laporan hasil fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	124 Lap	9.999.900	Bidang Pemnag
						1. Melakukan evaluasi perkembangan desa	√ √ √ √	√ √ √ √			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dok	15.000.000	Bidang Pemnag
Meningkatnya kualitas lembaga adat	Persentase peningkatan lembaga adat yang aktif				6%						PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	65%	1.974.443.800	
												Persentase usaha ekonomi masyarakat yang aktif	50%		
												Persentase lembaga adat yang aktif	84%		
											Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	65%	1.974.443.800	
												persentase usaha ekonomi masyarakat yang dibina	50%		
												Jumlah lembaga adat yang dibina	49 KAN		

					1. Melakukan klarifikasi data ninik mamak ke nagari 2. Melakukan Rekapitulasi data ninik mamak Melaksanakan rapat koordinasi dengan lembaga KAN 3. Pembinaan Posyandu 4. Kelembagaan posyandu	Identifikasi	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah LPM yang dibina Jumlah KAN yang dibina	1 Dok 10 LPM 10 KAN	86.200.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
					1. Menyusun SK narasumber dan moderator 2. survey lokasi pelaksanaan pelatihan PKK 3. Pelaksanaan pelatihan PKK 4. Melaksanakan rapat koordinasi		√ √	√	√	√	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	791.421.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
					1. Melakukan koordinasi dengan kodim terkait pelaksanaan TMMD 2. survey lokasi pelaksanaan acara TMMD 3. Pelaksanaan acara TMMD 4. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan TMMD		√ √ √	√	√	√	Fasilitasi Bulan bhakti gotong royong masyarakat	Jumlah laporan hasil fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat	1 lap	119.999.800	Bidang Keu dan Pembangunan Nagari
					1. Penyusunan SK 2. Nagari Gerakan dan Kader Dasawisma 3. Tim Penggerak PKK 4. Mempersiapkan Indikator Penilaian Nagari Gerakan dan Kader Dasawisma dalam kegiatan tim penggerak PKK 5. fasilitasi pelaksanaan jambore kader PKK 6. Pembinaan Pengurus Tim Penggerak PKK dan Kelembagaan PKK 7. Bimtek Pengurus TP. PKK 8. Bimtek Tim Penggerak PKK 9. Identifikasi Kelembagaan posyandu 10. Mempersiapkan administrasi, bahan dan dokumen pelaksanaan bimtek kelompok PKK Jorong		√ √ √ √ √ √ √ √ √ √	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah penilaian yang difasilitasi dalam kegiatan Tim penggerak PKK Jumlah fasilitasi jambore PKK yang Jumlah fasilitasi pelaksanaan pembinaan TP PKK Jumlah fasilitasi pelaksanaan bimtek penggerak TP PKK	1 dok 5 Kali 1 kali 8 kec dan 16 nag 7 kali	976.823.000	Bidang Pemberdayaan Masyarakat



Siung, Januari 2024
 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
 Siung,
 S.Hut.T
 19780507 199803 1 004